



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
DI JAKARTA SELATAN**

TESIS

**PUJI MEILITA SUGIANA
0906589293**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
DI JAKARTA SELATAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Master of Administration (M.A)**

**PUJI MEILITA SUGIANA
0906589293**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Puji Meilita Sugiana

NPM : 0906589293

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN
PUBLIK

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Puji Meilita Sugiana
NPM : 0906589293
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan

Disetujui oleh
Pembimbing Tesis,

(Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.Publ.)

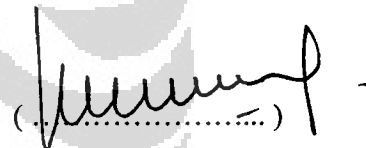
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Puji Meilita Sugiana
NPM : 0906589293
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan
Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
di Jakarta Selatan

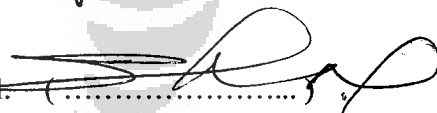
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi (M.A) pada Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

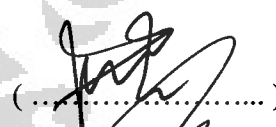
Ketua Sidang : Dr. Amy Y. S. Rahayu, M.Si

()

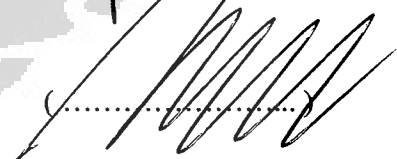
Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.Publ.

()

Penguji : Teguh Kurniawan, S.Sos., M.Sc.

()

Sekretaris Sidang : Lina M. Jannah, S.Sos., M.Si

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya meskipun dengan berbagai keterbatasan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi (M.A.) pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan hingga sampai akhir penulisan tesis ini, penulis tidak akan menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Dr. Roy Valiant Salomo M.Soc.Sc., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.Publ., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Lina Miftahul Jannah, S.Sos, M.Si., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini.
4. Dra. Susy Dwi Harini, M.M, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, yang telah dengan sabar membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Hj. Sadiyah S.Sos, selaku Kepala Sub Bidang Dayasos Provinsi DKI Jakarta, yang telah banyak memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.
6. Irwan Santoso, S.H, selaku Kepala Seksi Dayasos Sudin Sosial Jakarta Selatan yang banyak membantu memberikan masukan, arahan dan saran dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

7. Para anggota KUBE di Jakarta Selatan yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Para Bapak/Ibu Dosen dan Staf dilingkungan Program Studi Administrasi, yang telah memberikan bekal pengetahuan dan ilmu serta bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua dan adik-adik tercita yang tidak henti untuk memberikan doa dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga akhir penulisan tesis ini.
10. Shadu P. Y. W. yang tidak henti untuk memberikan doa dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga akhir penulisan tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan dalam Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Administrasi Kebijakan Publik angkatan XVII
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekuarangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis, sehingga penulis sangat membuka diri jika ada yang memberikan kritikan, masukan dan pendapat dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semu pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan tesis ini dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jakarta, Juli 2012

Puji Meilita Sugiana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indoensia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Meilita Sugiana
NPM : 0906589293
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program
Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
di Jakarta Selatan**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat sengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal: 10 Juli 2012
Yang menyatakan



(Puji Meilita Sugiana)



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN
PUBLIK

ABSTRAK

Nama : Puji Meilita Sugiana
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Kelompok usaha bersama adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Jakarta sebagai pusat negara dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan proses kementerian sosial dalam rangka MPMK. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup Keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulan dan pendampingan. Pelaksanaan KUBE belum menjadi jawaban yang pasti dalam pengentasan kemiskinan di ibu kota. Jakarta selatan dipilih sebagai *pilot project* program ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan dan mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan program KUBE. Dalam pelaksanaannya kemampuan manajerial serta pemasaran dalam bentuk kemasmenjadi kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan penilaian terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Selain itu Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sarasannya secara lebih besar. Hambatan dari pelaksanaan program ini adalah pada implementasi program ini, banyaknya jenis usaha macet. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program ini.

Kata Kunci : Kebijakan, Kemiskinan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



UNIVERSITY OF INDONESIA
FAKULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTEMENT OF ADMINISTRATION SCIENCES
POSTGRADUATE PROGRAM
ADMINISTRATION STUDY PROGRAM MAJORING
ADMINISTRATION PUBLIC POLICY

ABSTRACT

Name : Puji Meilita Sugiana
Study Program : Administration Public Policy
Title : The Implementation of Policy for Decreasing Poverty Through a Program of Economic Empowerment Group Together (KUBE) in South Jakarta

The focus of this study is implementation of policy for Tackling Poverty through a program of economic empowerment group together (KUBE) in South Jakarta. Joint business group is one of the Government through the Ministry of social programs to minimize poverty rate in Indonesia. Jakarta as the Centre of the country with the complexity of the problems of implementing this program in 2009. KUBE is an integrated approach to the method from Social Departement of whole process in order MPKP. It is not intended to replace all the prosedure except for social welfare assistance programs that cover the entire process. Formution of KUBE began with the formation of the group as a result of process guidance, social skill training and assistance and mentoring stimulant. Implementation of the KUBE is not yet a definite answer in alleviating poverty in the capital. South Jakarta was chosen as a pilot project this program. Managerial capability in the implementation as well as marketing in the form of packaging to be obstacles faced. This research is a qualitative research using the method of data collection in the form of interviews. The interviewer is a people who has a qualification to answer.

The results of this research suggest to carry out assessment of the needs of the target group. In addition to Mentoring KUBE needs to be improved and expanded so that its effectiveness in improving the skills of the KUBE members became higher and can ultimately increase revenue goals are bigger. The resistance of the implementation this programme is the implementation of this programme has many of bussiness to a standstill. Still limited abilities and skill of its member has also become a obstacles in the implementation of the programme.

Key words : Policy, Poverty, and Joint Business Group (KUBE)

DAFTAR ISI

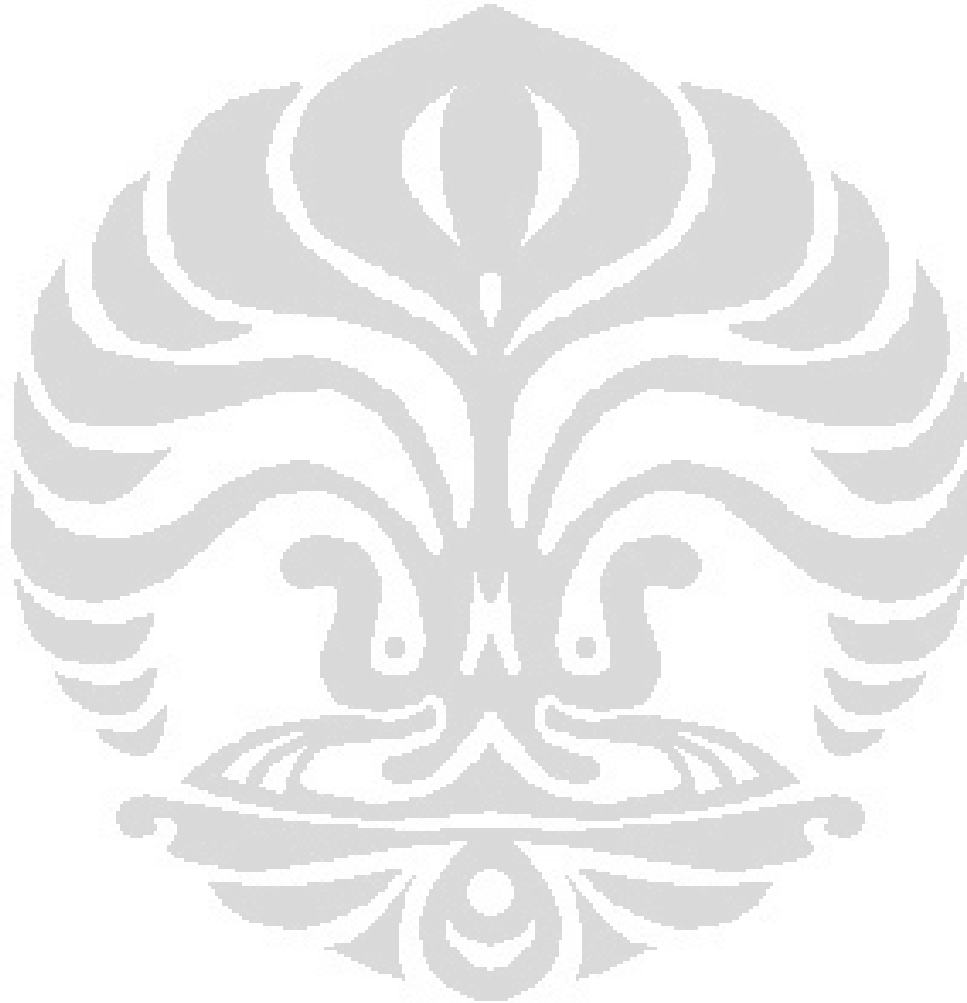
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Signifikansi Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Kebijakan Publik	13
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	13
2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	16
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik	18

2.2.3.1	Model Implementasi Kebijakan Publik Van Horn dan Van Meter	18
2.2.3.2	Model Implementasi Kebijakan Publik Mazmanian dan Sebatier	19
2.2.3.3	Model Implementasi Kebijakan Publik Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (<i>The Top Down Approach</i>)	23
2.3	Kemiskinan dan Penduduk Miskin Perkotaan	27
2.3.1	Pengertian dan Penyebab Kemiskinan	27
2.3.1.1	Pengertian Kemiskinan	27
2.3.1.2	Penyebab Kemiskinan	30
2.4	Pemberdayaan Masyarakat	33
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Pendekatan Penelitian	36
3.2	Jenis Penelitian	36
3.3	Lokasi Penelitian	37
3.4	Metode Pengumpulan Data	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Analisis Data	39
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KUBE DI JAKARTA SELATAN		42
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	42
4.1.1	Profil Wilayah Jakarta Selatan	42
4.1.2	Kondisi Kemiskinan di Jakarta Selatan	44
4.1.2.1	Potret Kemiskinan di DKI Jakarta	47
4.2	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di DKI Jakarta	51
4.2.1	Program KUBE Sebagai Salah Satu Program Penanggulangan Kemiskinan	52

4.2.1.1	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	52
4.2.1.2	Tujuan dan Sasaran KUBE	54
4.2.1.3	Proses Pengelolaan KUBE	54
4.2.1.4	Organisasi dan Manajemen KUBE	58
4.3	Pelaksanaan KUBE di Jakarta Selatan	72
4.3.1	Identifikasi KUBE di Jakarta Selatan	75
4.3.2	Pelatihan dan Pendampingan	80
4.3.3	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program KUBE	83
4.3.3.1	Karakteristik dari Masalah (<i>Trackability of the Problem</i>)	84
4.3.3.2	Karakteristik Kebijakan	89
4.3.3.2	Lingkungan Kebijakan	93
4.4	Hambatan dalam Pelaksanaan KUBE	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		100
5.1	Simpulan	100
5.2	Saran	101
DAFTAR REFERENSI		103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di DKI Jakarta	4
Gambar 4.2	Struktur Organisasi KUBE	60
Gambar 4.7	Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD)	81



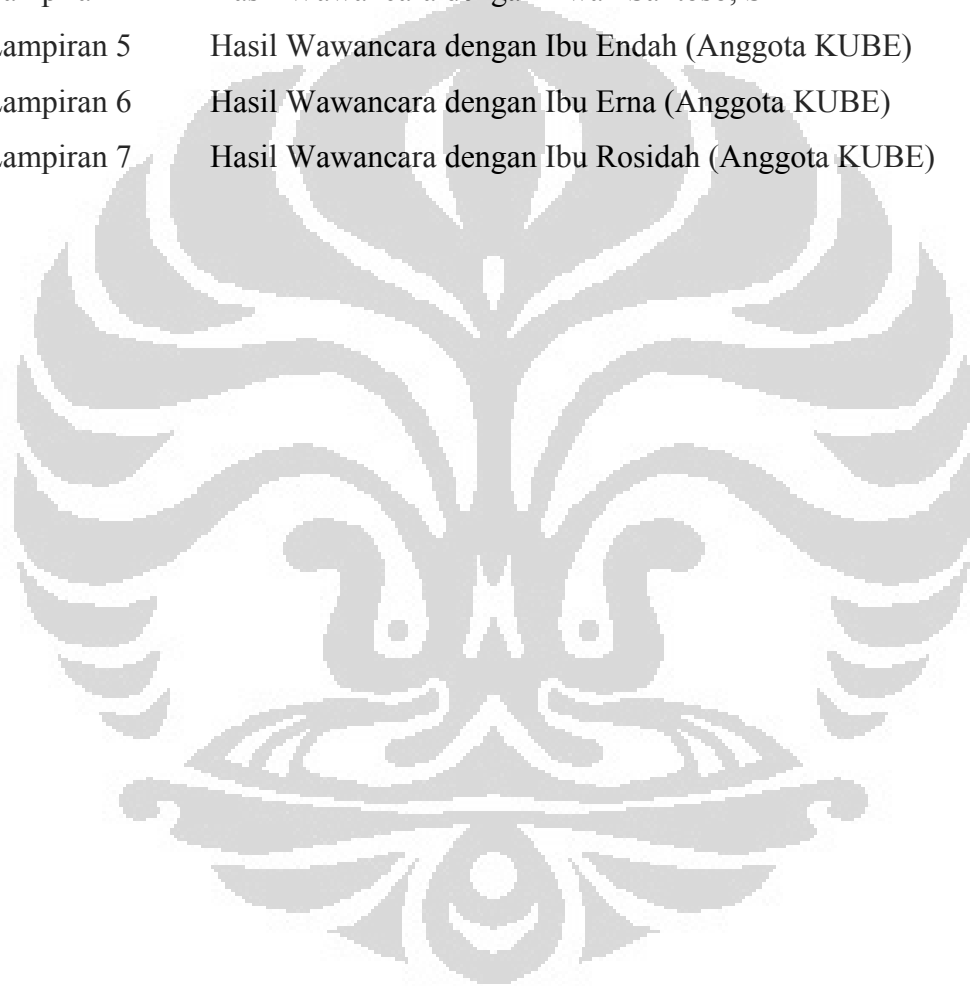
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah KUBE di DKI Jakarta	6
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Kecamatan, 2010	42
Tabel 4.2	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Maret 2011-Maret 2012	45
Tabel 4.3	Data dan Informasi Kemiskinan di Jakarta Selatan 2005-2006.....	47
Tabel 4.4	Data KUBE di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan	76
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Jakarta Selatan.....	89
Tabel 4.6	Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	95



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara Dinas Sosial DKI Jakarta |
| Lampiran 2 | Pedoman Wawancara Anggota dan Pengurus KUBE |
| Lampiran 3 | Hasil Wawancara dengan Dra. Susy Dwi Harini, M.M |
| Lampiran 4 | Hasil Wawancara dengan Irwan Santoso, SH |
| Lampiran 5 | Hasil Wawancara dengan Ibu Endah (Anggota KUBE) |
| Lampiran 6 | Hasil Wawancara dengan Ibu Erna (Anggota KUBE) |
| Lampiran 7 | Hasil Wawancara dengan Ibu Rosidah (Anggota KUBE) |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di seluruh dunia terdapat negara-negara yang penduduknya mencapai ratusan juta orang dengan berbagai kondisi, dari kondisi tersebut yang dapat di saksikan adalah fenomena yang berlawanan, yaitu: pada satu sisi terdapat negara maju dan makmur, namun pada sisi lain terdapat negara terbelakang dan miskin yang sebagian besar dialami oleh negara berkembang.¹

Kesenjangan negara miskin, berkembang dan negara maju memunculkan kondisi sosial masyarakat miskin, yang memunculkan pertanyaan: “mengapa hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?”. Kemiskinan ada dimana-mana, dan terjadinya pun oleh banyak faktor penyebab yang mempengaruhinya. Kondisi kemiskinan suatu negara merupakan permasalahan yang kompleks, kuantitas dan kualitasnya menjadikan gambaran kemajuan negara tersebut. Oleh karena itu, kemiskinan membutuhkan penanggulangan secara integral dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan yang perlu diatasi dengan melibatkan peran serta banyak pihak, utamanya adalah peran negara.

Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. Namun realitas hingga saat ini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia. Teknologi boleh saja maju, negara-negara merdeka makin bertambah, dan negara-negara kaya semakin banyak dan semakin kaya tetapi jumlah orang miskin di dunia tak pernah berkurang, bahkan kemiskinan dapat digambarkan telah bertransformasi menjadi wajah teror yang menghantui dunia.

¹ Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan negara berkembang akan melambat ke angka yang relatif rendah sebesar 5,3 persen di tahun 2012, sebelum sedikit meningkat ke 5,9 persen di tahun 2013 dan 6,0 persen di tahun 2014. Pertumbuhan di negara-negara maju juga akan melemah, masing-masing sebesar 1,4, 1,9 dan 2,3 persen untuk tahun 2012, 2013 dan 2014 – dengan PDB di zona Euro menurun sebesar 0,3 persen di tahun 2012. Secara keseluruhan, PDB dunia diproyeksikan akan meningkat masing-masing sebesar 2,5, 3,0 dan 3,3[1] persen untuk tiga tahun tersebut.

Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu Negara berkembang maupun sedang berkembang. Tokoh yang dianggap bapak ilmu ekonomi modern, Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into The Wealth of Nations* tahun 1976 menyebut bahwa, tidak ada masyarakat yang benar-benar bisa berkembang dan senang apabila kebanyakan diantaranya miskin dan tidak bahagia. Tokoh ekonomi pembangunan Todaro dalam buku *Economic Development* (2003), menyebutkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan utama pembangunan. Tokoh sosial lainnya Juan Somavia dalam *United Nations World Summit for Sosial Development*, tahun 1995 menyatakan bahwa persoalan yang tidak akan pernah selesai di abad 21 ini adalah bagaimana mengurangi kemiskinan.

Negara-negara sedang berkembang berada di sebagian wilayah Asia dan Afrika, sangat berurusan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Sebagian besar rakyat di kawasan ini masih menyandang kemiskinan. Sementara bagi negara maju, mereka pun sangat tertarik membahas kemiskinan. Ketertarikan itu karena kemiskinan di negara berkembang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik mereka, pada akhirnya kemiskinan menjadi urusan semua bangsa dan menjadi musuh utama (*common enemy*) umat manusia di dunia.

Pemerintah Indonesia, selama melaksanakan pembangunan, baik pada masa orde lama, orde baru dan hingga kini di orde reformasi masih belum banyak mencapai keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.² Pembangunan dengan berbagai konsepnya yang telah dilakukan pemerintah masih nyata belum menyentuh perbaikan kondisi sosial masyarakat miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan, hal tersebut terlihat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin. Justru pada beberapa kota besar kemiskinan menjadi permasalahan yang merepotkan pemerintah daerah, dimana pembangunan dan peningkatan

² Data tentang kemiskinan dari Human Development Report tahun 2009 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Malaysia ada 3,9% dari populasi, Singapura 3,8%, Thailand 8,5%, Filipina 12,4%, sedangkan di Indonesia 17%. Data ini menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia jauh lebih besar daripada negara-negara tetangga, karena persentasenya besar dan Indonesia memiliki populasi yang terbesar.

kesejahteraan penduduknya tidak jarang memunculkan gejolak sosial. Misalnya, terlihat pada kebijakan untuk membangun fasilitas sosial, menertibkan pedagang kaki lima dan lain-lain, seringkali menimbulkan gejolak sosial, misalnya perlawanan dari masyarakat atas kebijakan tersebut. Sebenarnya, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1983:2-3). Modernitas yang bertumpu pada nilai-nilai masyarakat bangsa untuk tetap terjaga dan dipertautkan menjadi asset untuk pembangunan fase yang berkelanjutan dan berkesinambungan, termasuk pengentasan kemiskinan.³

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Masyarakat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian ayat (2) disebutkan bahwa “Negara berkewajiban menangani masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial.” Di samping itu, UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 20 huruf a menyatakan; salah satu tujuan penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin. Peraturan mengenai penanggulangana kemiskinan kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usahadan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

³ Oleh karena itu, Ndraha (dalam Boediono, 2006:313), menyatakan bahwa “Konsep pembangunan sosial juga harus dilihat kaitannya dalam rangka upaya untuk mewujudkan cita-cita negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Konsep tersebut bersumber dari pemahaman tentang fungsi Negara. Dalam konsep *Welfare State* negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi terutama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia”. Dalam banyak hal, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan ini juga akan terkait dengan hak-hak azasi manusia. Selanjutnya, sebagai upaya untuk memenuhi kondisi kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat, serta hak azasi manusia, maka pemenuhan kebutuhan dapat dirumuskan secara berjenjang (Lihat Teori Maslow), hal ini akan terkait dengan asumsi bahwa kondisi kehidupan semakin sejahtera apabila semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi.

Kementerian Sosial RI sebagai penanggung jawab pengentasan kemiskinan telah menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud salah satunya dilaksanakan dengan media Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sampai dengan akhir tahun 2009 Kementerian Sosial RI telah berhasil menumbuhkembangkan KUBE lebih dari 19.000 unit.

KUBE merupakan salah satu embrio Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Penanggulangan KUBE dan LKM telah dilaksanakan Kementerian Sosial RI sejak tahun 2003 dengan membentuk LKM-KUBE Sejahtera. Pada kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2005 telah terbentuk LKM-KUBE Sejahtera sebanyak 87 unit yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Kemudian tahun 2008 sampai 2009 telah melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui 35 unit LKM-KUBE Sejahtera yang tersebar di 19 provinsi. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2010 telah terbentuk 144 LKM-KUBE Sejahtera yang melibatkan 1440 KUBE.

DKI Jakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu dijadikan barometer bagi provinsi lainnya, karena karakteristiknya sebagai Ibukota Negara maka Provinsi DKI Jakarta layak dijadikan sebagai barometer keberhasilan pembangunan bagi masing-masing Provinsi di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki berbagai permasalahan pembangunan, kependudukan, industri dan lain-lain, saat ini berfokus pada pengentasan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat kota.⁴ Alasan mendasar dari pemecahan kemiskinan adalah, bahwa masalah kemiskinan di perkotaan dapat menimbulkan efek domino bagi pembangunan itu sendiri.

Data yang diperoleh dari BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 menyebutkan bahwa dari total penduduk hampir 9,15 juta orang, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta sampai dengan Maret tahun 2010 sebesar 312,18 ribu orang (3,48%) yang mengalami penurunan bila dibandingkan pada periode Maret

⁴ Kemiskinan perkotaan merupakan salah satu isu pembangunan yang kompleks dan kontradiktif. Kemiskinan dipandang sebagai dampak ikutan dari pembangunan dan bagian dari masalah dalam pembangunan. Keberadaan kemiskinan ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketimpangan antar wilayah (Irawan, 2002:1).

2009 yaitu sebesar 323,17 ribu orang (3,62%). Berarti jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 10,99 ribu orang.

Dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan maka Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa strategi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta didukung secara penuh dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan, dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang bertindak sebagai payung hukum untuk mengkoordinasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Keduanya akan mendata seluruh warga miskin kota yang menjadi target sasaran, yaitu rumah tangga miskin (RTS).

Terdapat beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan, antara lain dengan mengkoordinasikan Balai Latihan Keterampilan Daerah (BLKD) untuk setiap wilayah di DKI Jakarta, tujuannya adalah memberikan keterampilan bagi warga miskin Jakarta yang memiliki potensi atau yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja, sehingga dengan memberikan keterampilan akan dapat diserap oleh perusahaan.

Selain itu, strategi yang akan diterapkan adalah memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi yang diterapkan dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat atau Ekonomi Rakyat Miskin. Dengan pemberdayaan ekonomi diharapkan masyarakat mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan melakukan aktivitas produksi sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi adalah dengan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dimana masing-masing individu fakir miskin diberikan bantuan permodalan, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana masyarakat secara berkelompok membentuk suatu usaha. Untuk membantu permodalan dan pemasaran hasil produksi UEP dan KUBE, maka dikembangkan pula Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) yang dibentuk dari, oleh, dan untuk UEP dan anggota KUBE. Diharapkan dengan

strategi yang dilakukan tersebut⁵, akan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu anggota dengan anggota lainnya, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu telah memiliki lebih dari seratus KUBE–LKMS di wilayah masing-masing. Data Dinas Sosial DKI Jakarta menyebutkan bahwa jumlah total KUBE adalah sebanyak 789 KUBE dan 29 LKMS. Berikut adalah rinciannya.

Tabel 1.1
Jumlah KUBE di DKI Jakarta

No	Wilayah Kota Administratif	Jumlah	
		LKMS	KUBE
1	Jakarta Pusat	6	158
2	Jakarta Utara	6	138
3	Jakarta Barat	5	152
4	Jakarta Selatan	5	144
5	Jakarta Timur	6	150
6	Adm. Kepulauan Seribu	1	47

Sumber: Data Sekunder, 2011

Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan dari berbagai aspek. Aspek SDM salah satunya, kemampuan manajerial pengelolaan baik secara

⁵ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad menurunkan angka kemiskinan sebesar 10 persen pada tahun 2011, sejumlah program dengan dana sebesar Rp. 2,6 Triliun diluncurkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Program tersebut antara lain pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, beasiswa, pelatihan keterampilan, secara berkelanjutan dan tersebar di sejumlah unit kerja seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial serta beberapa unit kerja lainnya (www.poskota.co.id., Jumat, 1 April 2011)

administratif maupun keuangan masih rendah terbatas manual serta masih kurangnya motivasi dari anggota KUBE sendiri seringkali menjadikan KUBE mati sia-sia. Berbagai KUBE dan LKMS yang sudah memproduksi masih belum memiliki kemasan yang baik serta pemasaran terhadap produk ini masih terbatas lingkup wilayahnya. Sedangkan dari aspek permodalan, masih terdapat masalah dalam pengembangan bantuan dan belum adanya perbankan yang memberikan pinjaman modal.

Wilayah Administrasi Jakarta Selatan merupakan wilayah yang dijadikan sebagai *pilot project* Kelompok Usaha Bersama. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jakarta Selatan jika dilihat dalam selang waktu lima tahun 2006-2010 menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan dengan rata-rata 6,10 persen pertahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2010 perekonomian Jakarta Selatan tumbuh sebesar 6,57 persen, lebih tinggi 1,23 persen dibanding pertumbuhan tahun lalu. Selain itu, pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang sebesar 6,51 persen.

Dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2001-2010, ternyata rata-rata pertumbuhan ekonomi Jakarta Selatan sebesar 5,65 persen lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 5,67 persen. Namun demikian karena merupakan bagian dari ibu kota Negara Republik Indonesia dan sentral berbagai kegiatan ekonomi, Jakarta Selatan memberi arti penting bagi pengembangan perekonomian DKI Jakarta khususnya dan secara umum perekonomian nasional (<http://jakselkota.bps.go.id>).

Sebagai upaya memantapkan arah pembangunan ekonomi masyarakat di Jakarta Selatan, diperlukan perencanaan dan pemetaan agar program tersebut bisa berjalan optimal. Setidaknya terdapat lima pilar yang diharapkan menjadi tumpuan strategis dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta Selatan. Lima pilar dimaksud di antaranya, kewirausahaan, pembiayaan usaha, pariwisata kota, reformasi birokrasi, dan infrastruktur menuju *Jakarta*

Service City. Jakarta Selatan memiliki potensi yang besar serta peluang yang menjanjikan untuk membangun dunia usaha yang mampu memberikan kenyamanan bagi para pengusaha dalam berinvestasi di Jakarta Selatan. Selain itu, Jakarta Selatan sangat strategis sekali keberadaannya, selain sebagai ibu kota Jakarta juga sebagai pusat perdagangan dan basis perekonomian nasional.

1.2 Perumusan Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat kompleks yang disebabkan terkait oleh berbagai faktor yang memicunya. Kemiskinan muncul oleh berbagai faktor misalnya: ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan kesehatan, rendahnya kemampuan dan keterampilan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi menyeluruh dan berkesinambungan.

Salah satu program yang dijalankan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta berdasarkan pada peraturan presiden tentang percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial, yang dibentuk oleh warga yang telah dibina melalui proses kegiatan proses untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif di berbagai bidang sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Wilayah DKI Jakarta yang luas membuat kajian ini hanya dibatasi di wilayah Jakarta Selatan. Pemilihan Jakarta Selatan dikarenakan karena karakteristik wilayah dan masyarakat di Jakarta Selatan memiliki keragaman yang berbeda jika di bandingkan wilayah lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan

2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak di capai oleh peneliti dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan program KUBE.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini juga memiliki signifikansi manfaat penelitian secara akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kebijakan Publik khususnya mengenai Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
2. Signifikansi Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Dinas Sosial dalam hal pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di DKI Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini digambarkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memuat tinjauan pustaka merupakan uraian dasar teori yang berhubungan dengan konsep kebijakan publik, konsep implementasi kebijakan publik, model implementasi kebijakan publik, dalam konteks hubungan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan pendekatan penelitian, fokus penelitian, pemilihan informan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KUBE DI JAKARTA SELATAN

Bab ini merupakan pembahasan gambaran umum objek penelitian program KUBE di Jakarta Selatan serta mengolah data yang telah di kumpulkan dan menganalisis hasil dari pengolahan data tersebut untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diambil simpulan dari uraian yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, kemudian akan diberikan saran-saran berkaitan dengan simpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada subbab ini penulis akan memaparkan tinjauan penulis atas beberapa penelitian dan kajian ilmiah terdahulu serta beberapa konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Guna mendukung skripsi peneliti yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi KUBE di Jakarta Selatan”** maka peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki kemiripan dengan tema peneliti.

Penelitian pertama berjudul **Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat** oleh Andi Erwing. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi yang terkait dengan relevansi perencanaan, efektivitas biaya, proses, keluaran dan hasil kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RKP 2009 di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk untuk mengetahui penyebab perbedaan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek relevansi perencanaan, efektivitas alokasi biaya penanggulangan kemiskinan, proses, keluaran dan hasil pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta aspek lainnya. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif akan digunakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis data kuantitatif ataupun data kualitatif melalui pemaknaan (*understanding of understanding*). Hasil dari penelitian ini adalah persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, maka diketahui faktor penyebab lebih cukup tingginya

penurunan tren penduduk miskin di Kalimantan Barat yaitu faktor relevansi perencanaan, keluaran, hasil dan efektifitas biaya pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan RKP 2009 yang cukup baik. Namun jika dinilai dari skor maksimal yaitu 10, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di kedua lokasi belum maksimal memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, karena rata-rata skor semua aspek yang dievaluasi di kedua lokasi hanya pada skor 7.

Penelitian kedua berjudul **Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah** oleh Kartubi. Program PPK di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan selama 3 tahun yaitu pada fase I, berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh tercapai tidaknya suatu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk: a. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PPK di Lokasi Penelitian b. untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. c. untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam program PPK d. untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPK.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa dengan analisa deskriptif kemudian hasil analisa program PPK dijadikan dasar untuk mengkaji Kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert yang mengerti permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Analisa kebijakan tersebut menggunakan metode Analisis Hirarki proses (AHP). Secara umum pelaksanaan program PPK di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Seputih Surabaya berjalan dengan baik. Program PPK berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program PPK berhasil menciptakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu Program PPK juga berhasil mengaktifkan aparat

kecamatan dan desa serta lembaga-lembaga desa dalam memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Disamping itu program PPK juga berhasil menghadirkan infrastruktur desa dan berkembangnya usaha ekonomi produktif di pedesaan. Akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan pada tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang terutama untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif cukup baik, akan tetapi sasaran yang hendak dicapai yaitu penduduk miskin kurang dapat dicapai, karena kegiatan Usaha Ekonomi Produktif hanya mencapai masyarakat miskin yang sudah punya usaha, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berdaya kurang bisa disentuh.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia.

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan, James E Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Di samping itu kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud,

pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

Selanjutnya, penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan *private*/swasta. Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh ahli berkaitan dengan kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.

Luasnya makna kebijakan publik disampaikan oleh Charles O. Jones di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.

Selanjutnya, Santoso (1998: 4-8), memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye bahwa "*Public policy is whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Dye telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki "apa" yang dilakukan, "mengapa" mereka melakukannya, dan "bagaimana" akibatnya.

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud

tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan tersebut, maka dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Irfan Islamy (1997: 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- (1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- (2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- (3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- (4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik, yaitu; tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Kebijakan publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis kebijakan sendiri merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis ditujukan menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (William N, Dunn, 2000).

Samudro Wibowo (1994:190) menjelaskan bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: (1) kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah; dan (2) kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Hasil dari analisis kebijakan pada umumnya sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih lanjut atau kebijakan alternatif yang lain.

2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan sebuah kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat Dunn, implementasi suatu kebijakan publik merupakan proses yang *inheren* dengan kebijakan publik itu sendiri. Artinya implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu, Merilee S. Grindle mengatakan implementasi memiliki tugas “... *to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity*” (Grindle, 1980, hal.6). Implementasi merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan publik dengan realitas yang diinginkan.

Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky adalah “*to carry out, accomplish, fulfil, produce, complete*” (Nakamura, et.al, 1980, Hal.13). Dari pengertian ini, implementasi dapat dikemukakan sebagai suatu kegiatan untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan, yang berarti pula menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Dari berbagai pendapat ahli di atas, implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut.

Apabila proses implementasi telah berjalan, maka diharapkan akan muncul suatu keluaran yaitu hasil segera (*effect*) dan dampak akhir (*impact*). Hasil segera adalah pengaruh atau akibat jangka pendek yang dihasilkan oleh suatu implementasi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan adalah sejumlah akibat yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan melalui proses jangka panjang. Hasil

segera dan dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai implementasi dari suatu kebijakan.

Tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya lebih sukar daripada sekedar merumuskannya. Proses formulasi kebijakan memerlukan pemahaman berbagai aspek dan disiplin ilmu yang terkait serta pertimbangan mengenai berbagai pihak, baik dalam posisinya sebagai *stakeholder* maupun berbagai aktor namun implementasi menyangkut kondisi nyata yang sering berubah dan sukar diprediksikan. Disamping itu, dalam perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, dalam kenyataan terjadi apa yang disebut Andrew Dunsire sebagai "*implementing gap*", yakni kesenjangan atau perbedaan antara apa yang telah dirumuskan dengan apa yang dapat dilaksanakan. Dalam batas tertentu kesenjangan ini masih dapat dibiarkan, sekalipun dalam monitoring harus diidentifikasi untuk segera diperbaiki. Kesenjangan yang lebih besar dari batas toleransi harus segera diperbaiki. Besar kecilnya kesenjangan tersebut sedikit banyak tergantung pada apa yang oleh Walter Williams disebut sebagai "*implementation capacity*" dari organisasi atau aktor atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. "*implementation capacity*" tidak lain adalah kemauan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai (Wahab, 1997, hal.61). Menurut Hogwood dan Gunn, kegagalan kebijakan (*policy failure*) dapat disebabkan antara lain:

1. Karena tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya *Non implementation*
2. Karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan *unsuccessful implementation*. *Non implementation* mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga, betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi (Sumaryadi, 2005, hal.85).

Sementara itu, *unsuccessful implementation* biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang mempunyai resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh pelaksanaannya jelek (*bad execution*) kebijakan itu sendiri yang jelek (*bad policy*), atau kebijakan tersebut memang bernasib jelek (*bad luck*).

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi, 2005, hal.88).

2.2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik Van Horn dan Van Meter

Implementasi kebijakan memiliki berbagai model, model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan

berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
 - b. Karakteristik agen pelaksana/ implementor.
 - c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
 - d. Kecenderungan (disposition) pelaksana/Implementor.
- (Nugroho, 2008, hal.438).

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Yang dimaksud agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kemudian pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya yang dimaksud disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni:

- a) Tanggapan, implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan,
- c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.1.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang kedua adalah model implementasi yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983)

yang mengemukakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik dari masalah (*Trackability of the problem*), sebuah karakteristik kebijakan (*Ability of statute to structure implementation*) dan lingkungan kebijakan (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*) (Subarsono, 2005, hal.94).

Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi *Framework for Implementation analysis*:

a. Karakteristik masalah

1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu diimplementasikan.

2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.

Ini berarti suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih kuat, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda-beda.

3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.

4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik kebijakan

1) Kejelasan isi kebijakan

Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan kebijakan ini merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi.

2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi

3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

4) Seberapa besar ada keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Kegagalan sebuah program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

5) Kejelasan dan konsistensi aturan.

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat dalam melaksanakan tugas pekerjaan atau program-program.

7) Seberapa luas akses kelompok di luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya akan relatif mendapatkan dukungan

daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

c. Lingkungan kebijakan

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi sebuah program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

- 2) Dukungan publik terhadap kebijakan

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

- 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*)

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: 1) kelompok pemilih dapat melakukan investasi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja yang dijalankan oleh badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

4) Tingkat komitmen keterampilan dari aparat dan implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat dari badan-badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

2.1.3.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gunn (*The Top Down Approach*)

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab, (2004, hal. 71-78), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius.

Beberapa kendala pada saat implementasi kebijakan seringkali berada di luar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang berada di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksana.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

Syarat kedua ini kerap kali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Artinya, kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena alasan terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan lainnya adalah bahwa para politisi kadangkala hanya peduli dengan pencapaian tujuan, namun kurang peduli dengan penyediaan sarana yang digunakan untuk mencapainya, sehingga tindakan-tindakan pembatasan/pemotongan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan program karena sumber-sumber yang tidak memadai. Masalah lain

yang biasa terjadi ialah apabila dana khusus untuk membiayai pelaksanaan program sudah tersedia harus dapat dihabiskan dalam tempo yang sangat singkat, kadang lebih cepat dari kemampuan program/proyek untuk secara efektif menyerapnya.

Salah satu hal yang perlu pula ditegaskan disini, bahwa dana/uang itu pada dasarnya bukanlah *resources*/sumber itu sendiri, sebab ia tidak lebih sekedar penghubung untuk memperoleh sumber-sumber yang sebenarnya. Oleh karena itu, kemungkinan masih timbul beberapa persoalan berupa kelambanan atau hambatan-hambatan dalam proses konversinya, yaitu proses mengubah uang itu menjadi sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program atau proyek.

Kekhawatiran mengenai keharusan untuk mengembalikan dana proyek yang tidak terpakai habis pada setiap akhir tahun anggaran seringkali menjadi penyebab kenapa instansi-instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) selalu berada pada situasi kebingungan, sehingga karena takut dana itu menjadi hangus, tidak jarang pula terbeli atau dilakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua, artinya disatu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, pada setiap tahapan proses impelementasinya perpaduan diantara sumber-sumber tersebut benar-benar dapat disediakan.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran karena kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara sembrono/asal-asalan, melainkan karena kebijakan itu sendiri memang buruk. Penyebab dari kemauan ini, kalau mau dicari, tidak lain karena kebijakannya itu telah disadari oleh tingkat pemahaman yang

tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi. Sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang itu. Dalam kaitan ini Pressman dan Wildavsky (1973), menyatakan secara tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis (sekalipun tidak secara eksplisit) mengenai kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan bakal terjadi sesudahnya. Oleh karena itu, apabila ternyata kelak kebijakan itu gagal, maka kemungkinan penyebabnya bersumber pada ketidaktepatan teori yang menjadi landasan kebijakan tadi dan bukan karena implementasinya yang keliru.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

Dalam hubungan ini Pressman dan Wildavsky (1973) juga memperingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya. Semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Hubungan ketergantungan harus kecil.

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal, yang untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain, atau walaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan/instansi-instansi lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu

program ternyata tidak hanya membutuhkan serangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan/komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah besar aktor/ pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapakan kemungkinan akan semakin berkurang.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai, dan kesepakatan terhadap, tujuann atau sasaran yang akan dicapai, dan yang penting, keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan tersebut haruslah dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikualifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dengan mana pelaksana program dapat dimonitor.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayun langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal (*unitary administrative system*) seperti halnya satuan tentara yang besar yang hanya memiliki satuan komando, tanpa kompartementalisasi atau konflik di dalamnya.

Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi maupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yakni praktik pelaksanaan kekuasaan. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Pernyataan yang terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah/komando dari siapapun dalam system administrasi itu. Apabila terdapat potensi penolakan terhadap perintah itu maka ia harus dapat didefinisikan oleh kecanggihan sistem informasinya dan dicegah sedini mungkin oleh sistem pengendalian yang handal. Dengan kata lain, persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain (baik yang berasal dari kalangan dalam badan atau organisasi sendiri maupun yang berasal dari luar) yang kesepakatan dan kerjasamanya amat diperlukan demi berhasilnya misi program.

2.3 Kemiskinan dan Penduduk Miskin Perkotaan

2.3.1 Pengertian dan Penyebab Kemiskinan

2.3.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia. Kebutuhan asasi ini meliputi kebutuhan akan substitensi, afeksi, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang. Dengan adanya kebutuhan asasi tersebut, terjadilah berbagai jenis kemiskinan diantaranya. Kemiskinan substitensi terjadi karena rendahnya pendapatan, tak terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Kemiskinan perlindungan terjadi karena meluasnya budaya kekerasan atau tidak memadainya sistem perlindungan atas hak dan kebutuhan dasar. Kemiskinan afeksi terjadi karena adanya bentuk-bentuk penindasan, pola hubungan eksploitatif antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam. Kemiskinan pemahaman terjadi karena kualitas pendidikan

yang rendah, selain faktor kuantitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan. Kemiskinan partisipasi terjadi karena adanya diskriminasi dan peminggiran rakyat dari proses pengambilan keputusan. Kemiskinan identitas terjadi karena dipaksakannya nilai-nilai yang asing terhadap budaya lokal yang mengakibatkan hancurnya nilai sosio kultural yang ada (KIKIS, 2000).

Chambers dalam Khairullah (2003) menyatakan kemiskinan yang disebut kemiskinan mutlak sebagai kondisi hidup yang ditandai dengan kekurangan gizi, tuna aksara, wabah penyakit, lingkungan kumuh, mortalitas bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang rendah. Kemiskinan merupakan keadaan yang kompleks dan menyangkut banyak faktor yang saling terkait dan menyebabkan orang-orang dalam kategori miskin tetap berada dalam perangkap ketidakberdayaan. Faktor yang saling berkaitan tersebut seperti adanya pendapatan yang rendah, kelemahan fisik, isolasi atau keterasingan, kerawanan, dan tidak memiliki kekuatan politik dan tawar-menawar.

Ada tiga macam konsep kemiskinan yang paling sering dijadikan acuan yakni: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif (Sunyoto Usman, 2003). Kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (*a fixed yardstick*). Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup minimum anggota masyarakat (sandang, pangan, dan papan). Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standart*, yaitu dengan memperlihatkan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (*in terms of judgement*) anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Sedangkan konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal *a fixed yardstick* dan tidak memperhitungkan *the idea of relative standard*. Kelompok yang menurut kita berada dibawah garis kemiskinan boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu konsep kemiskinan semacam ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami

kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya.

Pemikiran tentang kemiskinan telah banyak berubah seiring dengan perubahan waktu dan zaman. Namun demikian, pada dasarnya kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2004:194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya.

Penjelasan didasarkan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan, menjadikan seseorang menjadi miskin (Ridlo, 2001:8).

Pengertian dengan tinjauan yang sama, bahwa kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat (Nugroho dan Dahuri, 2004: 165-166).

Pengertian kemiskinan ditinjau dari basis keluarga, didefinisikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2003: 25), dinyatakan: keluarga yang termasuk kategori miskin adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan serta transportasi.

Penjelasan beberapa pengertian kemiskinan tersebut di atas, bahwa kemiskinan ditinjau dari aspek-aspek terutama aspek sosial, ekonomi dan politik yang menitikberatkan pada ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan hidup

pangan, sandang, papan dan kesehatan serta beberapa akses pengembangan diri seseorang untuk hidup layak. Oleh karena itu, menurut Rusli, dkk (1995:51-52), menjelaskan bahwa: harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian, dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimum tertentu. Ketidakmerataan lebih menekankan pada standar hidup relatif diantara anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut ketidakmampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.

2.3.1.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor⁶, misalnya oleh kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi terjadi akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial diakibatkan oleh hasil pembangunan yang tidak merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Kemiskinan kultural budaya diakibatkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004:167-168).

Penyebab kemiskinan yang lain, yaitu: (1) kemiskinan yang diakibatkan globalisasi berupa dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang; (2) kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan berupa rendahnya partisipasi dalam pembangunan dan peminggiran proses pembangunan;

⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), dijelaskan penyebab kemiskinan dibedakan menjadi dua, **Pertama**, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara. **Kedua**, kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan oleh: (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

(3) kemiskinan sosial yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas karena ketidakberdayaan mereka; dan (4) kemiskinan karena faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk (Cox, 2004:1-6).

Menurut Sharp et.al, menjelaskan penyebab kemiskinan dipandang dari sudut ekonomi. *Pertama*, ketidaksetaraan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. *Kedua*, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses-akses dalam modal (Kuncoro, 2004:157).

Kemiskinan sering dianalogikan dengan semua sifat kekurangan dan ketidakberdayaan. Analogi ini mengakibatkan definisi kemiskinan menjadi sangat luas sehingga untuk memahaminya akan menemui kesulitan, oleh karena itu penentuan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan akan menemukan kesulitan pula. Dengan demikian, untuk membuat suatu kebijakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan haruslah dipahami secara benar jenis dan batasan atau pengukuran kemiskinan itu sendiri.

Menurut Muttaqien (2005) secara umum penyebab kemiskinan dapat dianalisis dari akibat yang terjadi. Kemiskinan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan memiliki penyebab yang khas. Daerah pedesaan cenderung didominasi lahan pertanian sehingga penyebab kemiskinan paling utama dapat diprediksi dari sektor tersebut. Kurangnya pemerataan pembangunan saat ini turut memperparah keadaan. Kemiskinan di perkotaan merupakan imbas dari kemiskinan di pedesaan yang menyebabkan arus urbanisasi meningkat. Kemampuan kota yang terbatas namun terus-menerus mendapat input dari pedesaan membuat daya dukung kota melemah. Puncaknya, berbagai pemukiman kumuh (*slum*), kriminalitas dan pengangguran menjadi makin meningkat.

Kemiskinan yang terjadi di pedesaan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah dan tingginya tingkat pengangguran menyebabkan meningkatnya arus migrasi ke kota

(urbanisasi). Hal ini justru menimbulkan masalah baru di desa dan terutama di kota. Secara umum kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh:

- a. Faktor pendidikan yang rendah.
- b. Terjadinya ketimpangan kepemilikan lahan pertanian. Tanah pertanian hanya dikuasai tuan tanah, sedangkan masyarakat miskin hanya menjadi buruh tani
- c. Tidak meratanya investasi dibidang pertanian.
- d. Rendahnya perhatian pemerintah dalam bidang pertanian. Selama ini bidang pertanian selalu termarjinalkan. Pemerintah berorientasi pada pembangunan sektor industri. Fondasi pertanian ternyata masih rapuh. Kebijakan pertanian belum mendukung pertanian.
- e. Kebijakan pembangunan bertumpu di kota. Arus lalu lintas uang dan barang lebih besar terjadi di kota.
- f. Budaya pemerintah yang buruk (*bad governance*). Hal ini berakibat pada buruknya pelayanan pemerintah pada publik. Sistem birokrasi mejadi panjang dan rumit.
- g. Sistem pertanian yang masih menggunakan cara tradisional.
- h. Tingkat kesehatan yang mengkhawatirkan.
- i. Rendahnya produktivitas masyarakat dibidang pertanian.
- j. Budaya masyarakat yang tidak disiplin, kurang suka bekerja keras, dan cenderung agraris.

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di perkotaan antara lain:

- a. Terjadinya arus urbanisasi besar-besaran dari desa. Migrasi yang besar tanpa disertai peningkatan daya dukung kota akan menyebabkan efek negatif bagi kota tersebut.
- b. Tingkat pendidikan yang rendah. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin sulit melakukan mobilitas vertikal dalam hal pekerjaan dan peran dalam masyarakat.
- c. Tingginya angka pengangguran, terutama pada usia produktif.

- d. Penataan kota yang belum baik, meliputi sistem transportasi, pemukiman dan lain-lain.
- e. Regulasi atau peraturan yang kurang mendukung mulai dari sitem RTRW (Rancangan Tata Ruang dan Wilayah) dan peraturan investasi yang kurang mendukung.
- f. Tata pemerintahan yang buruk (*bad governance*) sehingga pelayanan publik (*public service*) menjadi buruk dan mendukung terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- g. Sistem perpolitikan yang tidak stabil, terutama terjadi di tingkat daerah.
- h. Terjadinya ketidakadilan dalam pendapatan antara berbagai jenis pekerjaan dan berbagai golongan.
- i. Rencana pembangunan yang belum berpihak kepada rakyat kecil dan cenderung ke arah konglomerasi.
- j. Kebijakan otonomi daerah. Kemampuan tiap daerah berbeda. Daerah kayamemiliki kemungkinan lebih besar membuat rakyatnya lebih sejahtera. Di daerah miskin, berlaku hal sebaliknya.

Secara umum, kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan memiliki faktor penyebab yang hampir sama. Kemiskinan di pedesaan akan berimbas pada kota melalui urbanisasi. Sebagian besar kemiskinan terjadi di pedesaan. Namun kemiskinan di perkotaan adalah hal yang paling mudah dipantau karena arus informasi lebih baik daripada di pedesaan.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahamim sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses yang cukup lama (Wilson, 1996). Pengembangan masyarakat sejatinya merupakan proses, dan aspek terpenting dari integrasi proses tersebut adalah melibatkan masyarakat itu sendiri. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi sebuah proses yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh mereka sendiri karena masyarakat sendirilah yang mengerti akan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang mereka miliki. Inti dari pengembangan

masyarakat adalah proses peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu aspek dari peningkatan kesadaran adalah terbukanya peluang-peluang untuk tindakan menuju perubahan. Peningkatan kesadaran itu dapat dicapai melalui beberapa strategi, diantaranya melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, dan melalui pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran (dalam pengertian luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan (Ife dan Tesoriero, 2008: 148 dan 350).

Dalam pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa setiap masyarakat berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 342). Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara dalam hal kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional, dan sebagainya yang selama ini kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Tujuan dari sebuah usaha pengembangan masyarakat dikatakan berhasil apabila proses yang dilaksanakan menuju ke arah pencapaian tujuan.

Berdasarkan kajian mengenai ruang lingkup pemberdayaan masyarakat, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan baik pada tataran sistem, kelembagaan dan individu. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan kapasitas dalam upaya untuk mengembangkan masyarakat juga harus dilakukan pada tataran yang sama, yaitu pada tataran sistem, kelembagaan dan individu. Peningkatan kapasitas dalam tataran sistem meliputi usaha yang bersifat luas dan banyak menekankan keterlibatan pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya terutama dalam mengembangkan sebuah sistem pembangunan yang berpihak kepada

masyarakat. Dalam lingkup komunitas, proses peningkatan kapasitas adalah pada tataran kelembagaan komunitas dan pada tataran individu masyarakat.

Peningkatan kapasitas kelembagaan berarti usaha untuk meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini meliputi usaha penyadaran masyarakat untuk menyusun norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut pola perilaku masyarakat yang mana keluaran dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk pembangunan dalam lingkungannya. Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelembagaan yang lebih partisipatif dan transparan.

Peningkatan kapasitas individu lebih condong pada usaha untuk meningkatkan kemampuan individu-individu masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat sekitarnya. Upaya peningkatan kapasitas individu ini meliputi usaha-usaha pembelajaran baik dari ranah pengetahuan, sikap atau penyadaran kritis dan keterampilannya. Pemahaman mengenai pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses juga harus diikuti dengan usaha peningkatan kapasitas yang terus menerus.

Keluaran dari proses pengembangan masyarakat bukanlah suatu kondisi yang berhenti pada sebuah titik tertentu saat tujuan pengembangan itu dinyatakan tercapai, namun keluarannya harus berupa siklus yang terus menerus dan berkelanjutan, karena kondisi dan dinamika masyarakat terus berkembang dan ketika usaha peningkatan kapasitas telah mencapai suatu tingkatan tertentu, maka akan muncul tantangan-tantangan baru yang lebih kompleks dan lebih berat. Dalam siklus pengembangan masyarakat, proses peningkatan kapasitas dilakukan secara berulang-ulang sehingga kesadaran terhadap pembangunan akan menjadi budaya dan bagian dari masing-masing individu dalam masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara manusia dalam usaha mengerti sebuah fenomena sosial. Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, bagaimana ilmu pengetahuan dikelola, dan apa yang sesungguhnya merupakan masalah, solusi, dan kriteria pembuktian (Craswell, 1994:1). Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif**. Menurut Craswell (1994) “*qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Researchers are particularly interested in understanding how things occur*”.

3.2 Jenis Penelitian

Dari segi jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. **Widodo dan Mukhtar (2000)** menyebutkan bahwa penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada saat tertentu. Jenis penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, dalam hal ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok usaha bersama di Jakarta Selatan.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni, karena penelitian ini dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri dalam kerangka akademis. Penelitian murni lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti, sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti. Fokus penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti sendiri (**Prasetyo dan Jannah, 2005**).

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini adalah penelitian *cross-sectional*, karena penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu. Penelitian ini hanya digunakan dalam waktu yang tertentu yaitu pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2012, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Walaupun penelitian dilakukan dalam satu waktu tertentu tentu tidak dibatasi pada hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun saja akan tetapi sampai penelitian itu selesai. Jadi ketika peneliti merasa ada data-data yang tidak lengkap maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk melengkapi data (**Prasetyo dan Jannah, 2005**).

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di wilayah Kecamatan Pesanggerahan khususnya dan Jakarta Selatan pada umumnya. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena sebagai daerah yang memiliki kegiatan ekonomi terbesar di Jakarta. Selain itu wilayah ini juga dijadikan sebagai *pilot project* dari implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi kelompok usaha bersama di Jakarta Selatan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan sampelnya menggunakan cara *purposive*, dimana penelitian memakai berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta keingintahuan peneliti pada penelitian tentang karakteristik pribadi dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan, sebagai informan awal dipilih secara *purposive*, obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukan orang lain yang dapat membuka informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Cara ini biasanya lazim disebut sebagai *snow ball* yang dilakukan secara serial atau berurutan. Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah : Kelompok sasaran/penerima program, meliputi masyarakat

miskin berjumlah 3 rumah tangga (yang mewakili), pelaksana kebijakan, serta beberapa tokoh masyarakat.

Dengan memperhatikan karakter informan maka dalam penelitian ini jumlah informan yang dibutuhkan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu. Proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan yang lain, penyebaran satu informan ke informan yang lain berlangsung secara *snow balling* (bola salju), yaitu bermula dari seorang informan yang mungkin pengetahuan atau keterlibatan didalam permasalahan yang diteliti relatif sedikit beralih kepada informan yang keterlibatannya lebih besar (Hidayat, 2002:5).

Secara spesifik karakteristik informan adalah sebagai berikut:

1. Dra. Susy Dwi Harini, M.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Provinsi DKI Jakarta; dari narasumber ini dapat diperoleh informasi mengenai bagaimana perkembangan Kelompok Usaha Bersama di DKI Jakarta pada umumnya dan Jakarta Selatan khususnya. Informan ini juga memberikan informasi tentang hambatan yang dihadapi.
2. Irwan Santoso, SH sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Sudin Sosial Jakarta Selatan; narasumber ini khusus memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan Kelompok Usaha Bersama di Jakarta Selatan. Narasumber ini lebih memberikan informasi yang detail di wilayah Jakarta Selatan karena cakupan dari jabatan yang dijalani lebih khusus.
3. Anggota KUBE sebagai informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama. Anggota ini dipilih secara acak sebanyak 3 orang dan terdiri dari berbagai macam jenis usaha yang ada di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Ibu Endah selaku anggota KUBE Belibis, Ibu Erna selaku anggota KUBE Mandiri dan Ibu Rosidah selaku anggota KUBE Permai. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya objek dari kebijakan itu

sendiri. Pemilihan narasumber ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari sisi pelaksana kebijakan.

2. Dokumen, yaitu teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut kebijakan penanggulangan kemiskinan, bahan-bahan laporan pelaksanaan KUBE dan arsip lain yang relevan dengan kebijakan tersebut. Teknik ini dilakukan untuk melengkapi informasi peneliti disamping untuk mendukung teknik-teknik pengumpulan data yang telah disebutkan diatas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data, terdiri dari : (1) Wawancara secara mendalam (*in-dept interview*); (2) Dokumentasi; sehingga *thick description* didapatkan, sedangkan pencatatan data dan penulisnya dilakukan dengan cara memanfaatkan bentuk-bentuk instrumen penelitian, diantaranya : penelitian, *field note*, *interview write ups*, *mapping*, *photographic*, *sound* serta beberapa dokumen penting arsip buku laporan tahunan program pencapaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta umumnya dan Jakarta Selatan pada khususnya.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif kualitatif, meliputi langkah-langkah:

1. Reduksi Data

Dari lokasi penilitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan untuk di pilih yang terpenting kemudian di cari tema atau polanya (melalui proses

penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan di sortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

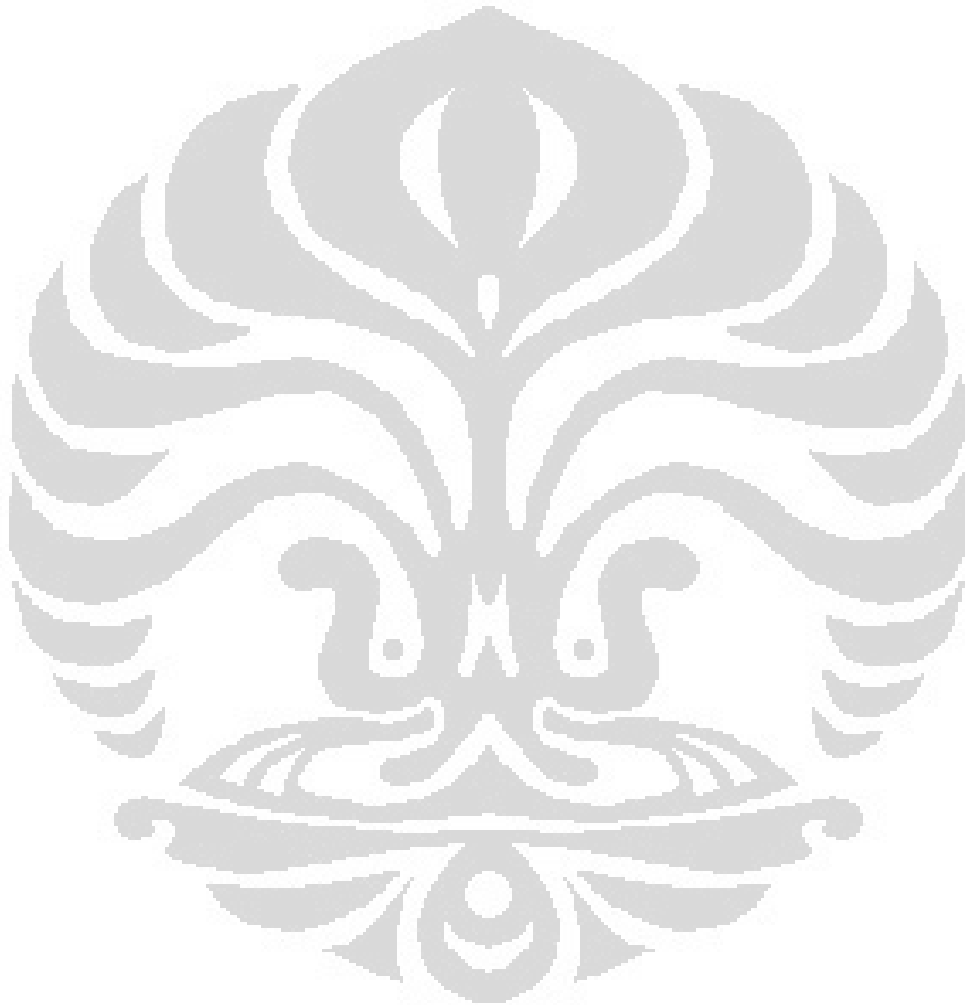
Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mepermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu (Tabel, gambar atau grafik) sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data dan reduksi.

3. Penarik kesimpulan (Verifikasi)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotensis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*.

Melalui ketiga tahapan analisis tersebut, maka kesimpulan selalu dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang logis, data kualitatif berupa pandangan-pandangan tertentu terhadap fenomena yang terjadi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Beberapa data kuantitatif yang terdiri dari angka-angka untuk mendukung adanya prosentase hubungan antara data yang berkaitan

dengan masalah yang dikaji. Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar.



BAB IV
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KUBE
DI JAKARTA SELATAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Wilayah Jakarta Selatan

Jakarta Selatan terletak pada 106°22'42 Bujur Timur (BT) s.d. 106°58'18 BT, dan 5°19'12 Lintang Selatan (LS). Luas Wilayah sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1815 tahun 1989 adalah 145,37 km² atau 22,41% dari luas DKI Jakarta. Terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan, berada di belahan selatan banjir kanal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Banjir Kanal Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Tanah Abang, Jl. Kebayoran Lama dan Kebun Jeruk
- b. Sebelah Timur : Kali Ciliwung
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Administrasi Depok
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ciledug, Kota Administrasi Tangerang.

Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.893.705 jiwa. Jumlah penduduk terpadat berada di Kecamatan Tebet dan yang terjarang adalah Kecamatan Cilandak.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan, 2010

No.	Kecamatan	Total	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Tebet	221.421	9.53	23.234,10
2	Setiabudi	100.582	9.05	11.114,03
3	Mampang Prapatan	141.160	7.74	18.237,73

No.	Kecamatan	Total	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
4	Pasar Minggu	257.781	21.91	11.765,45
5	Kebayoran Lama	270.423	19.31	14.004,30
6	Cilandak	181.562	18.20	8.975,93
7	Kebayoran Baru	157.370	12.91	12.189,78
8	Pancoran	119.437	8.23	14.512,39
9	Jagakarsa	242.714	25.38	9.563,20
10	Pesanggrahan	201.255	13.47	14.940,98
	Jakarta Selatan	1.893.705	145.73	12.994,61

Sumber: Sudin Kependudukan & Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan

Jakarta Selatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Jakarta yang juga menjadi Ibukota negara Indonesia dituntut untuk terus menerus mengembangkan dirinya sesuai dengan dinamika pembangunan yang berkembang dan semakin maju. Jakarta Selatan dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi, sosial kependudukan, dan sarana prasarana kota yang memadai.

Jakarta Selatan merupakan daerah pemukiman. Masih banyak ditemukan perkampungan alami yang terdiri dari mayoritas komunitas budaya asli Betawi. Dengan kondisi lingkungan yang hijau, teduh dan tenang, menjadikan wilayah ini sebagai pilihan golongan ekonomi atas dan warga asing untuk bermukim. Hal ini terlihat dari munculnya pemukiman golongan ini di berbagai bagian wilayah Jakarta Selatan, seperti Setiabudi, Pondok Indah, Permata Hijau, Kebayoran Baru, dan Kemang.

Fenomena di atas telah mendorong tumbuh pesatnya sektor ekonomi. Berbagai pusat perbelanjaan berkembang dengan pesat, seperti International Trade Centre (ITC) Fatmawati, Gandaria City, Kawasan Kemang, Poin Square dan Carefour di kawasan Lebak Bulus, dan lainnya. Munculnya pusat perbelanjaan ini

semakin melengkapi pusat perbelanjaan sebelumnya, yaitu kawasan Blok M menjadi icon belanja warga dan seluruh warga Jakarta, bahkan luar kota.

Jakarta Selatan juga memiliki potensi pengembangan industri kecil bahkan sampai dengan pangsa ekspor. Di antaranya sentra konveksi pakaian di Mampang dan Kebayoran Lama. Potensi lainnya adalah sektor wisata alam. Jakarta Selatan memenuhi syarat sebagai pusat wisata lingkungan, flora, dan fauna, karena kaya akan situ dan danau, kolam pemancingan, pohon dan buah langka dan produktif (rambutan rapih, nangka lande, krendang, pohon kapuk, kemuning, melinjo, pepaya, pisang, jambu, dukuh, tanaman anggrek).

Potensi wisata ini semakin besar dengan kekayaan budaya tradisional Betawi. Ragam budaya asli ini sudah diinventarisir, diantaranya seni tradisional Qasidah, Marawis, Keroncong, Gambang Kromong, Lenong, Gambus, Pencak Silat, dan berbagai tarian Betawi. Festival-festival seni dan budaya juga semakin gencar dilakukan di Jakarta Selatan untuk melestarikan budaya Betawi dan memperkaya khasanah budaya Jakarta, seperti festival Kemang dan Festival Palang Pintu.

Perkembangan pembangunan Jakarta Selatan yang sangat pesat, di samping menimbulkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif, seperti narkoba, kemacetan transportasi, dan sebagainya. Permasalahan ini terus menjadi perhatian dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk terus memperbaiki diri seiring perkembangan zaman yang semakin modern dan maju.

4.1.2 Kondisi Kemiskinan di Jakarta Selatan

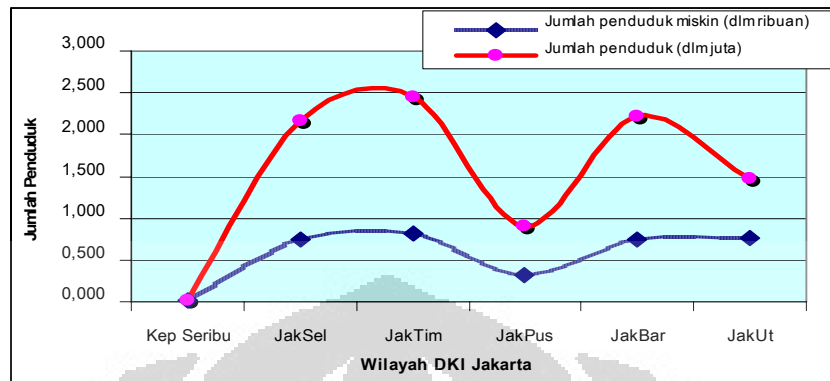
Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2012 sebesar 363,20 ribu orang (3,69 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 sebesar 363,42 ribu orang (3,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,22 ribu.

Tabel 4.2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Di DKI Jakarta Maret 2011-Maret 2012

Bulan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Maret 2011	229.147 (64,46 %)	126.333 (35,54 %)	355.480 (100,00 %)	363,42	3,75
Maret 2012	244.832 (64,59 %)	134.220 (35,41 %)	379.052 (100,00%)	363,20	3,69

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2011 dan Maret 2012.

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama Maret 2011-Maret 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,63 persen, yaitu dari Rp 355.480 per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp 379.052 per kapita per bulan pada Maret 2012. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Namun demikian, selama periode Maret 2011-Maret 2012, sumbangan GKM terhadap GK mengalami sedikit perubahan yaitu sebesar 0,13 poin.



Gambar 4.1

Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin DKI Jakarta

Sumber: BPS, DKI Jakarta, 2009

Pada grafik tersebut, terlihat sebaran penduduk miskin di seluruh wilayah DKI Jakarta yang terbanyak ada di wilayah Jakarta Timur sampai dengan tahun 2009 berjumlah 81.200 penduduk miskin, diikuti wilayah Jakarta Utara berjumlah 76.200 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di wilayah Kepulauan Seribu.

Berdasarkan data dan informasi kemiskinan tahun 2005–2006, kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin, persentase distribusi penduduk miskin dan pendidikan yang ditamatkan, persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas dan status bekerja, persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas dan sektor bekerja. Pada tahun 2005, Jakarta Selatan memiliki 64.000 penduduk miskin atau 3,36 persen dari total penduduk yang tinggal dengan garis kemiskinan wilayah Rp263.740. Pendidikan yang dapat ditamatkan oleh penduduk miskin sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi yaitu 41,86 persen tamat SLTA, 30,23 persen tamat SD/SLTP dan hanya 27,91 persen yang tidak tamat SD. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas yang tidak bekerja sebesar 34,58 persen, yang bekerja pada sektor informal sebesar 31,78 persen dan yang bekerja pada sektor formal sebesar 33,64 persen. Jika dibedakan antara sektor pertanian dan non pertanian, sebesar 0,93 persen penduduk miskin bekerja pada sektor pertanian dan sisanya sebesar 64,49 persen bekerja pada sektor non pertanian.

Pada tahun 2006, Jakarta Selatan memiliki 76.300 penduduk miskin atau 3,74 persen dari total penduduk yang tinggal dengan garis kemiskinan wilayah Rp263.740. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas yang tidak bekerja sebesar 29,21 persen, yang bekerja pada sektor informal sebesar 28,09 persen dan yang bekerja pada sektor formal sebesar 42,70 persen. Jika dibedakan antara sektor pertanian dan bukan pertanian, tidak ada penduduk miskin yang bekerja pada sektor pertanian dan sebesar 70,79 persen bekerja pada sektor bukan pertanian.

Tabel 4.3
Data dan Informasi Kemiskinan di Jakarta Selatan 2005-2006

No.	Informasi Kemiskinan	Tahun					
		2005			2006		
1	Jumlah Penduduk Miskin	64.000 orang			76.300 orang		
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,36			3,74		
3	Garis Kemiskinan Wilayah	Rp 263.740,-			Rp 263.740,-		
4	Persentase Distribusi Penduduk Miskin dan Pendidikan yang Ditamatkan (%)	SLTA	SD/SLTP	Tidak tamat SD	SLTA	SD/SLTP	Tidak tamat SD
		41,9	30,2	27,9	13,6	54,6	31,8
5	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas dan Status Bekerja (%)	Tidak bekerja	Sektor informal	Sektor formal	Tidak bekerja	Sektor informal	Sektor formal
		34,6	31,8	33,6	29,2	28,1	42,7
6	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas dan Sektor Bekerja (%)	Tidak bekerja	Pertanian	Non pertanian	Tidak bekerja	Pertanian	Non pertanian
		34,6	0,9	64,5	29,2	0	70,8

Sumber: BPS, 2007

4.1.2.1 Potret Kemiskinan di Jakarta Selatan

Karakteristik kemiskinan kota memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari lingkungan, perumahan, cara hidup, mata pencaharian, dan lain-lain. Gambaran penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta, secara rinci dijelaskan berikut ini.

1. Pemukiman Kumuh

Pemukiman atau perumahan kumuh di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh berbagai faktor pemicu baik secara ekonomi maupun keberadaan Kota Jakarta itu sendiri, selain itu faktor urbanisasi yang pesat ke daerah Jakarta. Pesatnya urbanisasi secara besar-besaran dari suatu daerah atau wilayah ke

wilayah lainnya yang pada umumnya dari desa ke kota, merupakan salah satu penyebab dari keberadaan pemukiman kumuh. Alasan perpindahan penduduk tersebut, adalah merubah keadaan baik secara ekonomi maupun status sosial dengan cara “mengais” rejeki dan mencari peruntungan di kota Jakarta. Tidak jarang pula orang datang ke Jakarta dengan melihat keberhasilan dari seseorang teman atau tetangga di desanya yang telah berhasil secara ekonomi hidup lebih baik di Jakarta, sehingga mereka pun menjadi tertarik untuk datang ke kota Jakarta.⁷

Namun yang terjadi adalah urbanisasi ke Jakarta menimbulkan persoalan-persoalan baru, antara lain: bertambahnya penduduk miskin, pemukiman kumuh bertambah, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya pengangguran, dan meningkatnya beban kota Jakarta. Munculnya pemukiman kumuh dilihat dari sisi ketersediaan lahan, yaitu bahwa luas lahan tidak dapat menyediakan warga pendatang. Oleh karena kenyataannya lahan di Jakarta sudah sangat mahal, dan terbatas sehingga bagi warga miskin tidaklah mungkin lagi untuk dapat memperoleh atau memiliki dengan cara membelinya.

Pesatnya pertumbuhan daerah perkotaan menyebabkan terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan, yang terkadang berdampak pada penyalahgunaan lahan, misalnya antara penggunaan lahan perumahan dengan penggunaan lahan industri atau penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau, pemukiman atau perkantoran. Kondisi demikian menjadikan warga pendatang (urban) dan penduduk Jakarta (miskin) akan terpinggirkan dan mencari tempat (lahan) pemukiman dengan seadanya. Lahan-lahan dengan keadaan seadanya tersebut dapat dijumpai antara lain, di kolong jembatan *flyover*, bantaran kali, lahan sepanjang rel kereta api, dan lain-lain.

Pemukiman kumuh yang berada di Jakarta selatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di Jakarta. Penduduk miskin di Jakarta selatan juga terdapat di wilayah-wilayah di tengah masyarakat bahkan ditengah-tengah perumahan

⁷ Sebenarnya yang terjadi ternyata tidak semudah yang dibayangkan, justru kehidupan di Jakarta memiliki persaingan dan tantangan yang sangat ketat. Tanpa memiliki keterampilan dan keahlian khusus bagi pendatang ke Jakarta akan sulit untuk dapat bersaing dan survive dengan yang lainnya.

elit, perkantoran, pusat bisnis dan lain-lain. Semua itu, memperburuk wajah kota Jakarta. Beberapa wilayah di Jakarta, dengan kondisi pemukiman yang kumuh misalnya di wilayah Kebayoran Baru, Pesanggrahan, Manggarai dan wilayah lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa penggunaan lahan di Jakarta menunjukkan adanya perubahan fungsi lahan yang cukup besar dari penggunaan untuk pertanian menjadi untuk bangunan dan jenis-jenis penggunaan lainnya. Sedangkan lahan untuk pemukiman penduduk menjadi sangat terbatas, akibatnya pemukiman kumuh adalah masalah yang muncul. Adapun wilayah-wilayah yang terdapat lingkungan pemukiman kumuh berat terbesar di Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, dan Pancoran.

2. Kondisi Pemukiman Kumuh

Selain di bantaran sungai dan di lahan sepanjang pinggir rel kereta api, pemukiman kumuh juga terdapat di wilayah atau areal lain. Wilayah lain yang sering digunakan oleh penduduk miskin DKI Jakarta untuk dibangun sebagai gubuk-gubuk rumah adalah perumahan penduduk golongan menengah keatas dan juga disekitar gedung-gedung perkantoran maupun lokasi bisnis, sehingga potret kemiskinan menjadi sangat kentara, yaitu adanya kesenjangan masalah sosial-ekonomi anatar penduduk miskin dengan penduduk golongan menengah ke atas, keadaan ini telah memperburuk kualitas visual kota Jakarta. Rumah-rumah kumuh penduduk miskin kota Jakarta Selatan umumnya berbentuk gubuk-gubuk liar yang terbuat dari bahan-bahan kayu atau triplek bekas yang digunakan sebagai dindingnya. Kondisi rumah-rumah kumuh yang dimiliki oleh penduduk miskin di Jakarta Selatan pada umumnya terlihat dalam bentuk gubuk-gubuk tersebut dapat dicirikan,⁸ yaitu:

- 1) Sanitasi atau kebersihan yang tidak memadai
- 2) Air bersih yang sulit diperoleh

⁸ Ciri-ciri pemukiman yang sehat, antara lain : adanya sarana dan prasarana sanitasi yang terawat, ventilasi udara yang cukup untuk pertukaran udara, bangunan yang teratur, sungai bangunan hanya sebagai rumah/hunian, dan adanya penghijauan.

- 3) Tidak memiliki tempat pembuangan sampah
- 4) Ventilasi udara yang minim
- 5) Hampir tidak ada ruang (*space*) jarak antara rumah
- 6) Rata bangun rumah yang tidak teratur
- 7) Rumah seringkali berfungsi ganda sebagai tempat usaha
- 8) Tidak adanya lahan untuk penghijauan
- 9) Jumlah penduduk di wilayah tersebut sangat padat

3. Pengamen, Pengemis dan Pengangguran

Selain pemukiman kumuh sebagai gambaran masyarakat miskin kota di DKI Jakarta, wajah kemiskinan kota juga dapat ditampakkan dengan banyaknya warga yang mengais rejeki dengan cara menjadi pengemis atau pengamen yang menjajakan (beroperasi) di berbagai sudut dan wilayah kota. Pada umumnya kelompok pengamen beroperasi dipersimpangan lampu merah, atau terminal-terminal bus kota, atau bus antar kota atau pertokoan seperti pasar Blok M yang banyak ditempati kaki lima. Sedangkan kelompok pengemis juga beroperasi hampir sama dengan kelompok pengamen, yaitu di persimpangan lampu merah, pasar tradisional, pusat toko, terminal, stasiun KA, dan lain-lain. Pengamen dan pengemis adalah dua kondisi sosial suatu warga yang juga termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang kelompok ini orangtuanya melibatkan anak-anaknya yang masih kecil dieksploitasi sebagai pengemis atau sebagai pengamen.

Selain dua kelompok yang sudah disebutkan, terdapat pula kelompok warga yang tidak memiliki pekerjaan atau sebagai warga pengangguran. Pengangguran pada kelompok-kelompok ini jelas adalah penduduk atau orang yang tidak memiliki "*skill*" atau keterampilan khusus yang dapat digunakan sebagai "modal" untuk memperoleh pekerjaan secara permanen pada sektor formal, ataupun ketiadaan modal untuk dapat berwira usaha mandiri, dengan keterbatasan tersebut mereka akan tetap menjadi pengangguran.

4.2 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di DKI Jakarta

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan merupakan tanggungjawab dari pemerintah pusat (negara) dan pemerintah daerah. Kewajiban dan tanggungjawab ini merujuk pada UUD 1945 pasal 34.⁹ Atas dasar itulah, maka penanggulangan kemiskinan merupakan tugas negara, dimana merujuk pada sistem pemerintahan Indonesia saat ini yang tidak lagi menerapkan sistem kebijakan pusat, maka otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah bagian dari pelaksana kebijakan pusat dengan memperhatikan kemampuan-kemampuan lokal bidang keuangan dan sumber daya lainnya untuk meneruskan pembangunan nasional. Untuk secara bersama-sama menanggulangi masalah kemiskinan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

Pemerintah daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan tersebut menindaklanjuti atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi setiap pemerintah daerah. Permasalahan penanggulangan kemiskinan hakekatnya adalah merupakan tanggungjawab dari pemerintah (negara) untuk dapat mensejahterakan penduduknya, keluar dari penderitaan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan nasional harus berorientasi dan berpihak kepada masyarakat miskin.¹⁰

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu pemerintah daerah (Pemda) yang juga memiliki permasalahan kemiskinan yang harus dapat ditanggulangnya untuk dapat mensejahterakan penduduknya. Sebab, seringkali wilayah Provinsi lain di Indonesia memandang keberadaan provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai rujukan dan barometer keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya untuk berbagai masalah pembangunan, termasuk dalam hal ini adalah pengentasan kemiskinan.

⁹ UUD 1945 pasal 34 menegaskan bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab negara untuk menanggulangnya: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"

¹⁰ Target penanggulangan kemiskinan secara nasional sesuai Proenas (2000-2004) adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 14 persen pada tahun 2004. Strategi yang diterapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu: (1) meningkatkan pendapatan melalui peluang usaha, kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas penduduk miskin; (2) mengurangi pengeluaran keluarga miskin untuk pangan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sedangkan, kebijakan utamanya adalah perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sosial.

Dalam hal upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Jakarta, maka pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan penanggulangan kemiskinan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta sampai dengan akhir tahun 2010 adalah 312,180 jiwa atau 3,48 persen dari total penduduk Jakarta.¹¹

4.2.1 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai Salah Satu Program Penanggulangan Kemiskinan.

4.2.1.1 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka MPMK. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ibu Susy Dwi Hartini sebagai berikut.

“..... seperti yang ada di peraturannya mbak, Kube itu kelompok warga atau keluarga binaan yang membuat suatu usaha bersama. Anggotanya berasal dari keluarga Miskin dan Sangat Miskin....”

Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulasi dan pendampingan. Program KUBE merupakan salah satu strategi Kementerian Sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan lembaga

¹¹ Pada periode yang sama Januari-Maret tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Jakarta 327.170 jiwa atau sebesar 3,62 persen. Artinya jumlah tersebut menurun sebanyak 10.990 jiwa pada tahun 2010. Penurunan angka kemiskinan di DKI Jakarta menurut Kepala BPS DKI Jakarta (Agus Suherman), dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi yang stabil mencapai angka 6,21 persen. Inflasi yang rendah 0,92 persen, serta upah minimum provinsi (UPM) yang meningkat dari Rp.1.069.865,- menjadi Rp.1.118.090,-

keuangan mikro. Program itu dilakukan dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan ketrampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan. Berikut hasil wawancara dengan Irwan Santoso selaku Kepala Seksi Dayasos Sudin Sosial Jakarta Selatan.

“...ini sebenarnya program dari Kementerian, Dananya berasal dari APBN berupa dana dekonsentrasi, berlaku secara nasional. Hanya kami adalah perpanjangan tangan mereka. Program ini memang bertujuan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan pemberian dana hibah untuk masing-masing anggota...”

KUBE ini disertai dengan adanya pendampingan, sehingga usaha yang digeluti KUBE dapat berkembang dengan optimal dan kesejahteraan anggotanya akan meningkat. Keberadaan pendamping KUBE ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pendamping KUBE memiliki peranan yang sangat strategis, yakni sebagai nara sumber, penggerak sekaligus sebagai fasilitator bagi pemberdayaan keluarga miskin. Sudah barang tentu untuk dapat melaksanakan tugas yang cukup berat tersebut para pendamping harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada para pendamping KUBE untuk tidak bosan-bosannya menambah pengetahuan yang dimiliki, sehingga saudara dapat melaksanakan tugas pendampingan secara optimal. Sebagai pendamping, saudara harus betul-betul mampu menjalin komunikasi yang baik dan dapat bekerjasama dengan anggota KUBE.

KUBE Program ini menjadi trademark-nya Kementerian Sosial. Metode Kelompok Usaha Bersama, memiliki dua unsur yang bisa dicapai oleh masyarakat yaitu keuntungan ekonomis dan sekaligus keuntungan sosial. Ini menjadi program yang sangat menarik, pertama karena dengan KUBE ini ada perguliran hasil usaha dan kedua adanya terjadi interaksi sosial, kesetiakawanan sosial diantara anggota kelompok KUBE maupun lingkungan sosialnya.

4.2.1.2 Tujuan dan Sasaran Kelompok Usaha Bersama

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui :

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok
2. Peningkatan pendapatan
3. Pengembangan usaha
4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Tujuan tersebut dinyatakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Ibu Susy dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Jadi, mbak program ini dibuat pasti dengan tujuan. Tujuan umumnya sebetulnya penghapusan kemiskinan dengan memberikan pendapatan lain seperti usaha untuk meningkatkan kesejahteraan social dan keberfungsian sosial keluarga miskin...”

Sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui media KUBE adalah kelompok warga masyarakat/keluarga sangat miskin/fakir miskin, miskin, dan hampir miskin sesuai kategori Badan Pusat Statistik (BPS), dengan skala prioritas bagi keluarga sangat miskin dan miskin.

4.2.1.3 Proses Pengelolaan KUBE

Tahapan Kegiatan KUBE:

1. Tahap Persiapan

Kegiatan pada tahap persiapan pembentukan KUBE terdiri dari:

- a. Pemetaan sosial khususnya yang terkait dengan kemiskinan
- b. Orientasi dan observasi
- c. Registrasi dan identifikasi
- d. Perencanaan program pelaksanaan
- e. Sosialisasi

- f. Bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi, dan evaluasi persiapan (oleh aparat pemerintah, petugas pendamping, Pembina fungsional)
2. Tahap Pelaksanaan
- Kegiatan pada tahap pelaksanaan KUBE meliputi:
- a. Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosial (KBS)
 - b. Pembentukan pra-kelompok dan kelompok
 - c. Bimbingan sosial
 - d. Pemilihan atau penentuan jenis usaha pelatihan pendamping
 - e. Pelatihan keterampilan usaha/kerja bagi anggota KUBE
 - f. Bantuan stimulant
 - g. Pendampingan
 - h. Monitoring
 - i. evaluasi
3. Tahap Pengembangan Usaha
- Kegiatan pada tahap pengembangan usaha meliputi:
- a. Bimbingan sosial
 - b. Bimbingan pengembangan usaha dan perluasan jaringan
 - c. Pemberian bantuan pengembangan usaha
 - d. Pendampingan
 - e. Monitoring
 - f. Evaluasi
4. Tahap Kemitraan Usaha
- a. Inventarisasi sumber-sumber yang ada (sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan sumber daya masyarakat)
 - b. Membuat kesepakatan-kesepakatan
 - c. Pelaksanaan kemitraan usaha
 - d. Bimbingan kemitraan usaha
 - e. Perluasan jaringan kemitraan usaha dalam rangka memperluas pemasaran serta mengakses permodalan

f. Monitoring

g. Evaluasi

Langkah-langkah Pembentukan KUBE:

1. Menetapkan struktur organisasi dan menyusun uraian tugas yang jelas dan terperinci.
2. Menata administrasi kegiatan kelompok dengan baik.
3. Mengidentifikasi potensi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh anggota KUBE.
4. Mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota KUBE.
5. Menyusun rencana program dan kegiatan, serta rencana anggaran biaya.
6. Menggalang kebersamaan dan kekompakan diantara sesama anggota KUBE dan juga dengan tokoh-tokoh kunci masyarakat serta lingkungan yang lebih luas.
7. Membangun komitmen bersama yang dapat menumbuhkan semangat dan motivasi kerja para anggota KUBE dalam mengembangkan jenis usaha yang dipilih.
8. Mengembangkan jenis usaha lebih dari satu yang sesuai dengan potensi dan sumber-sumber yang ada dalam lingkungan masing-masing.
9. Melakukan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan jenis usaha yang dipilih
10. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan kepercayaan anggota dan lingkungan sekitarnya.
11. Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak yang dapat menguntungkan kelompok KUBE.
12. Mewujudkan usaha koperasi yang dapat mendukung kesejahteraan para anggota KUBE.

Adapun prinsip pengelolaan KUBE adalah sebagai berikut:

1. Penentuan nasib sendiri

Anggota KUBE sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, mempunyai hak untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Dalam nilai seperti ini, para pendamping sosial yang terlibat dalam kegiatan KUBE berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan KUBE tersebut.

2. Kekeluargaan

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUBE perlu dibangun atas semangat kekeluargaan diantaras sesama anggota KUBE dan lingkungannya. Nilai seperti ini akan menumbuhkan suatu semangat dan sikap kerja tanpa pamrih dalam mewujudkan keberhasilan KUBE.

3. Kegotongroyongan

Kegotongroyongan berarti menuntut perlu adanya kebersamaan dan semangat kebersamaan diantara sesama para anggota KUBE, dalam prinsip tidak menonjolkan adanya perbedaan antara atasan dan bawahan, tetapi lebih mengedepankan kebersamaan diantara sesama.

4. Berbasis potensi lokal

Pengelolaan dan pengembangan KUBE harus didasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para anggota KUBE, dan didasarkan pada ketersediaan sumber/potensi yang ada di daerah tersebut agar tidak menjadi suatu kendala.

5. Keberlanjutan

Pengelolaan KUBE, kegiatan-kegiatannya, dan bidang usaha yang dikembangkan harus diwujudkan dalam bentuk program yang berkelanjutan, bukan hanya untuk sementara waktu.

6. Usaha yang berorientasi pasar

Pengembangan KUBE melalui jenis usaha yang dilakukan harus diarahkan pada jenis usaha yang memiliki prospek yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

7. Transparansi dan akuntabilitas

Pengelolaan KUBE dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

Selain KUBE yang ditumbuhkembangkan melalui Program Bantuan Kesejahteraan Fakir Miskin, langkah / kegiatan pokok pembentukan KUBE untuk sasaran PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya adalah :

1. Pelatihan ketrampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan ketrampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan bisnis usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri PMKS untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya.
2. Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan ketrampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu
3. Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh PSK yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Panitia Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS).

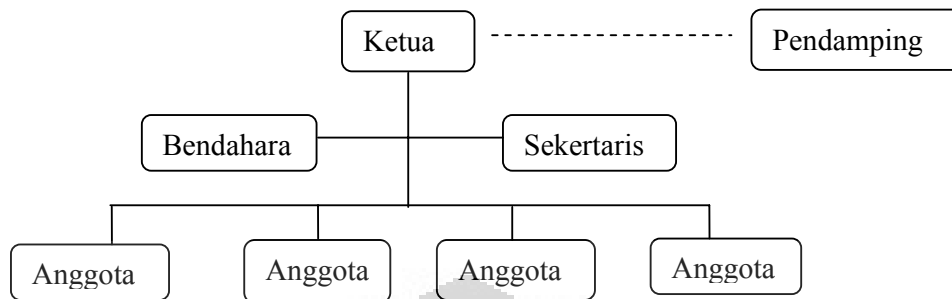
4.2.1.4 Organisasi Dan Manajemen KUBE

Kepengurusan KUBE pada hakekatnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok. Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdikan, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan

mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya. Keanggotaan KUBE adalah PMKS sebagai sasaran program yang telah disiapkan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE berkisar antara 5 sampai 10 orang/KK sesuai dengan jenis PMKS. Khusus untuk Pembinaan Masyarakat Terasing dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh pembentukan KUBE berdasarkan unit pemukiman sosial, artinya suatu unit pemukiman sosial adalah satu KUBE.

Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE dengan baik, maka pengurus maupun pengelola KUBE perlu memiliki catatan atau administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya. Catatan dan administrasi KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE, pembukuan keuangan / pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya.

Dalam setiap organisasi maka pembinaan, monitoring dan evaluasi wajib dilaksanakan. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah mulai dan tingkat propinsi, kabupaten/kodya, kecamatan dan desa / kelurahan secara berjenjang. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dan tingkat desa, kecamatan, kabupaten / kodya, propinsi dan pusat dalam koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) PROKESRA secara berjenjang. Berikut adalah struktur Organisasi Kelompok Usaha Bersama untuk setiap jenis usaha.



Gambar 4.2
Struktur Organisasi

Sumber: diolah Peneliti, 2012

Pembentukan KUBE didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kedekatan tempat tinggal.
- 2) Jenis usaha atau keterampilan anggota.
- 3) Ketersediaan sumber sosial dan ekonomi .
- 4) Kemampuan menyesuaikan diri dalam kelompok.
- 5) Kesamaan motivasi.
- 6) Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang sebelumnya.

Keanggotaan KUBE ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga yang masuk kategori miskin dan sangat miskin.
- 2) Berdomisili tetap.
- 3) Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun.
- 4) Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok.
- 5) Memiliki potensi dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha bersama (KUBE) terdiri beberapa aktivitas, yaitu:

A. Penyaluran Kredit / Bantuan

Proses penyaluran kredit / bantuan kepada KUBE oleh LKMS dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. KUBE mengajukan proposal sebanyak 3 (tiga) jenis, yaitu proposal untuk kredit/bantuan berupa dana, proposal bantuan/kredit berupa sarana produksi (saprodi) dan proposal bantuan sarana lingkungan/pemukiman. Proposal kredit/bantuan berupa dana, berisi:
 - a. Pendahuluan
Berisi latar belakang usulan usaha yang menggambarkan alasan dan prospek pengembangan usaha.
 - b. Gambaran Usaha Berisi tentang gambaran detail rencana usaha meliputi jenis usaha, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek kebutuhan, dan hal lain yang dibutuhkan.
 - c. Analisa Keuangan Berisi tentang perhitungan keuangan usaha untuk pemodal (biaya produksi, pemasaran, dll.) dilengkapi dengan estimasi harga jual dan keuntungan.
 - d. Penutup
 - e. Lampiran
Proposal kredit/bantuan berupa saprodi berisi kebutuhan saprodi untuk melakukan produksi, berupa lampiran dari proposal kredit/bantuanyang berupa dana. Proposal bantuan sarana lingkungan/pemukiman berisi kebutuhan sarana lingkungan/pemukiman untuk mendukung produksi, berupa lampiran dari proposal sarana lingkungan/pemukiman yang berupa dana.

Pembuatan proposal dapat dibimbing oleh pendamping teknis dan pendamping lapangan. Proposal diajukan oleh anggota KUBE melalui ketua KUBE dan diketahui oleh pendamping teknis.
2. LKMS didampingi oleh pendamping teknis dan pendamping lapangan meneliti kelayakan usaha yang diusulkan oleh KUBE atau peserta UEP. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meneliti kelayakan usaha

KUBE atau UEP, antara lain adalah kesesuaian dengan plafon dana yang ada, prospek pengembangan usaha, dan hal lain yang dianggap perlu.

3. Setelah proposal yang diajukan oleh KUBE atau peserta UEP diteliti kelayakannya oleh LKMS, maka:
 - a. Apabila proposal yang diajukan dianggap tidak layak, maka LKMS mengembalikan proposal tersebut kepada KUBE atau peserta UEP yang bersangkutan disertai dengan alasan teknis penolakan pemberian kredit/bantuan sehingga proposal dapat diperbaiki sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh LKMS.
 - b. Apabila proposal yang diajukan dianggap layak, maka selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama antara LKMS dengan KUBE atau peserta UEP. Perjanjian kerjasama antara LKMS dengan KUBE atau peserta UEP harus diketahui oleh Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan setempat dan dibubuhi materai secukupnya. Perjanjian kerjasama dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk pihak KUBE atau peserta UEP, pihak LKMS, dan Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan setempat.
 - c. Proposal yang ditolak dapat diajukan kembali setelah diperbaiki dan memenuhi persyaratan LKMS.
4. Setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, LKMS memberikan kredit/bantuan kepada KUBE atau peserta UEP berupa dana saprodi serta kebutuhansarana dan prasarana lingkungan/pemukiman. Kebutuhan saprodi dan sarana dan prasarana lingkungan/pemukiman tidak dapat digantidalam bentuk dana.
5. Setiap pemberian kredit/bantuan LKMS dan sarana dan prasarana lingkungan/pemukiman kepada KUBE atau peserta UEP harus disertai dengan tanda terima yang sah.
6. Khusus untuk pengadaan kredit/bantuan berupa saprodi, LKMS dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (suplier), dan barang saprodi disalurkan langsung kepada KUBE atau peserta UEP.

7. Untuk kredit/bantuan yang berupa pinjaman, dana tersebut wajib dikembalikan oleh KUBE atau peserta UEP dengan pola pengembalian yang telah dimusyawarahkan bersamadalam musyawarah LKMS.
8. Dalam penyaluran kredit/bantuan LKMS dapat:
 - a. Menentukan kriteria-kriteria tertentu dalam pemberian kredit/bantuan kepada KUBE atau peserta UEP sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Menentukan pola pengembalian kredit/bantuan yang berupa pinjaman.
 - c. Penetapan kriteria pemberian kredit/bantuan dan pola pengembalian kredit/bantuandilakukan dalam musyawarah LKMS dan diketahui oleh Kepala Seksi Dinas Sosial kecamatan setempat.
9. Dalam hal penyaluran kredit/bantuan pemerintah secara langsung kepada KUBE atau peserta UEP yang berupa dana, maka dana tersebut diberikan kepada KUBE atau peserta UEP sesuai kebutuhan dan sisanya disimpan di LKMS.
10. Dalam hal penyaluran kredit/bantuan pemerintah secara langsung kepada KUBE atau peserta UEP yang berupa saprodi, maka proses pengadaan saprodi dilakukan melalui LKMS dengan mengacu pada proses penyaluran kredit/bantuan saprodi yang tercantum pada poin (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).
11. Dana yang disimpan di LKMS sebagaimana tercantum dalam poin (9) dipergunakan untuk:
 - a. Dana IKS sebesar 30%;
 - b. Tambahan modal untuk kredit/bantuan kepada KUBE atau peserta UEP sebesar 70%;

B. Pengelolaan IKS

LKMS, UEP dan KUBE diwajibkan menyimpan dan mengelola dana IKS yang didapatkan dari iuran tiap anggota KUBE atau peserta UEP dan persentase dari keuntungan yang didapat oleh UEP, KUBE atau LKMS,

serta persentase simpanan kredit/bantuan pemerintah secara langsung kepada KUBE atau peserta UEP.

Tata cara pengelolaan IKS diatur sebagai berikut:

1. Sumber IKS, IKS bersumber dari:
 - a. Anggota KUBE minimal sebesar Rp. 1000,- per hari, dengan pembagian Rp. 500,- untuk disimpan dan dikelola oleh KUBE, dan Rp. 500,- untuk disimpan dan dikelola oleh LKMS.
 - b. Peserta UEP minimal sebesar Rp. 1000,- per hari yang disimpan dan dikelola oleh LKMS.
 - c. Persentase keuntungan usaha LKMS sebesar 40% dari jumlah total keuntungan usaha LKMS.
2. Pembayaran IKS
 - a. IKS disetor setiap hari oleh anggota KUBE kepada bendahara KUBE.
 - b. IKS untuk LKMS, disetor oleh bendahara KUBE atau peserta UEP kepada bendahara LKMS setiap tanggal terakhir tiap bulannya.
 - c. IKS untuk LKMS yang bersumber dari presentase keuntungan usaha dimasukkan ke dalam perhitungan dana IKS setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya.
3. Penggunaan dana IKS
 - a. Dana IKS yang disimpan dan dikelola oleh KUBE digunakan untuk bantuan bagi anggota KUBE yang terkena musibah dengan besar bantuan disesuaikan dengan ketersediaan dana IKS.
 - b. Dana IKS yang disimpan dan dikelola oleh KUBE dapat digunakan untuk pinjaman kepada anggota KUBE untuk pengembangan usaha atas persetujuan seluruh anggota KUBE yang diketahui oleh pendamping teknis. Pemberian pinjaman kepada anggota KUBE hanya dapat dilakukan apabila dana IKS yang tersedia dianggap telah melebihi dari perkiraan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada anggota KUBE yang mendapatkan musibah.

c. Dana IKS yang disimpan dan dikelola oleh LKMS dipergunakan dengan ketentuan:

1. Sebesar 40% digunakan untuk bantuan bagi anggota LKMS/KUBE/UEP yang terkena musibah dengan besar bantuan disesuaikan dengan ketersediaan dana.
2. Sebesar 30% digunakan untuk tambahan dana bagi kredit/bantuan yang akan disalurkan kepada KUBE atau peserta UEP sebagai pinjaman.
3. Sebesar 30% digunakan untuk dukungan operasional LKMS.
4. Pengelolaan Dana IKS

Untuk pengelolaan dana IKS, baik yang disimpan di KUBE ataupun yang disimpan di LKMS dibukukan dalam pembukuan tersendiri yang terpisah dengan pembukuan usaha KUBE atau LKMS.

C. Pengelolaan dan Pengembangan LKMS

Untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan LKMS agar menjadi lembaga yang fungsional dalam memberikan dukungan atas perkembangan KUBE atau peserta UEP yang bernaung dibawahnya, maka diatur sebagai berikut:

1. Tempat dan Kedudukan

LKMS bertempat dan berkedudukan di tingkat wilayah kecamatan dengan wilayah kerja satu kecamatan.
2. Kepengurusan
 - a. Kepengurusan LKMS sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekertaris, dan bendahara, yang dipilih dalam musyawarah LKMS dengan masa kepengurusan 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya dalam jabatan yang sama. Pendamping teknis tidak diperbolehkan dipilih menjadi pengurus LKMS.
 - b. Kepengurusan LKMS berasal dari perwakilan KUBE masing-masing sebanyak 1 (satu) orang, perwakilan peserta UEP sebanyak

3 orang darikeseluruhan peserta UEP di Kecamatan tersebut, pendamping lapangan, dan pendamping teknis.

c. Pengurus LKMS memiliki tugas dan wewenang untuk:

- 1) Bersama pendamping memberikan bimbingan dan binaan terhadap KUBE dan peserta UEP yang berada dalam naungannya.
- 2) Mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengembangkan LKMS, KUBE dan UEP dengan sepengetahuan pendamping teknis.
- 3) Bertindak atas nama LKMS untuk mewakili luar lembaga.
- 4) Mengangkat pengelola LKMS (manager, pegawai, dll) apabila diperlukan.
- 5) Menjalankan fungsi LKMS.
- 6) Memberikan laporan perkembangan LKMS yang terdiri dari laporan teknis dan laporan keuangan kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Seksi Dinas Sosial kecamatan setiap bulannya.
- 7) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota LKMS melalui musyawarah LKMS.

d. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Dalam menentukan suatu kebijakan LKMS, secara hierki keputusan diambil melalui:

- 1) Musyawarah LKMS
 - a) Musyawarah LKMS dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, dalam keadaan tertentu dapat dilakukan diluar itu.
 - b) Musyawarah LKMS dihadiri oleh perwakilan KUBE masing-masing sebanyak 1 (satu) orang, peserta UEP, pendamping lapangan, pendamping teknis, dan dapat mengundang perwakilan dari Dinas Sosial atau instansi terkait lainnya.

- c) Musyawarah LKMS dapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 peserta musyawarah LKMS sebagaimana yang tercantum pada poin (b) dan pendamping teknis.
- d) Musyawarah LKMS berwenang untuk : (1) mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus LKMS, (2) menetapkan program kerja, (3) memilih pengurus LKMS, (4) menetapkan kriteria-kriteria pemberian kredit/bantuan kepada KUBE atau peserta UEP, (5) menetapkan pola pengembalian kredit/bantuan yang berupa pinjaman, dan (6) mengambil kebijakan yang dianggap perlu.

2) Rapat Pengurus

- a) Rapat pengurus LKMS dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- b) Rapat pengurus LKMS dihadiri oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lain jika ada, serta pendamping lapangan dan pendamping teknis.
- c) Rapat pengurus berwenang untuk: (1) memutuskan pemberian kredit/bantuan kepada KUBE atau UEP yang mengajukan proposal, dan (2) mengambil kebijakan yang diperlukan.

3) Fungsi

LKMS memiliki fungsi untuk:

- a. Menyalurkan kredit/bantuan kepada KUBE atau peserta UEP berupa dana, saprodi dan sarana lingkungan/pemukiman;
- b. Membantu pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh KUBE atau peserta UEP;
- c. Memberikan bimbingan dan binaan terhadap KUBE atau peserta UEP yang berda dibawah naungannya;

- d. Mengajukan kredit kepada instansi perbankan atau instansi lainnya dalam rangka pengembangan usaha LKMS/KUBE atau UEP; dan
 - e. Membuka akses bagi KUBE atau peserta UEP baik dalam hal produksi ataupun pemasaran.
- 4) Usaha

Usaha yang dilakukan oleh LKMS meliputi:

- a. Jasa keuangan, dengan menyalurkan kredit/bantuan kepada KUBE atau peserta UEP berupa dana;
- b. Pengadaan barang, dengan menyediakan saprodi bagi KUBE atau peserta UEP; dan
- c. Pemasaran, dengan memasarkan produk-produk hasil KUBE atau peserta UEP.

Keuntungan usaha LKMS diperoleh dari (1) Jasa keuangan, LKMS berhak memperoleh jasa dari kredit/bantuan yang berbentuk pinjaman yang disalurkan kepada KUBE atau peserta UEP. Kredit/bantuan yang keuangannya bersumber dari subsidi/bantuan pemerintah tidak diperbolehkan untuk dikenakan jasa; (2) Pengadaan barang; LKMS berhak mengambil margin dari selisih harga beli dari supplier dan harga jual kepada KUBE atau UEP dengan besar margin sebesar-besarnya adalah dua setengah (2,5)%. Pembelian/pengadaan saprodi yang keuangannya bersumber dari subsidi/bantuan dari pemerintah tidak diperbolehkan mengambil margin; (3) Pemasaran; LKMS berhak mendapatkan margin sebesar sepuluh(10) % dari harga jual produk-produk KUBE atau peserta UEP yang dipasarkan melalui LKMS. Selanjutnya pengelolaan Keuntungan Usaha Keuntungan yang diperoleh LKMS, sebesar 25% dipergunakan untuk honor pengurus,

pengelola, pendamping, dan keperluan khusus lainnya, sebesar 25% dipergunakan untuk keperluan administrasi LKMS seperti ATK, penggandaan, dan lain-lain, sebesar 40% dimasukkan ke dalam dana IKS dan sebesar 10% dijadikan sebagai sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan kepada seluruh anggota LKMS/KUBE/UEP secara merata yang dibagikan setiap akhir tahun.

5) Pengembangan LKMS

Dalam rangka pengembangan LKMS maka LKMS:

- a. Dengan bimbingan dan binaan dari pendamping lapangan dan pendamping teknis dapat membentuk KUBE baru. Pembekuan KUBE baru harus diusulkan kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui kepala seksi Dinas Sosial kecamatan setempat. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan KUBE baru antara lain adalah ketersediaan dana untuk disalurkan kepada KUBE baru, KUBE lain di bawah naungannya telah dianggap mapan, dan hal lain yang dianggap perlu.
- b. Dengan bimbingan dan binaan dari pendamping lapangan dan pendamping teknis dapat mengajukan kredit kepada lembaga perbankan atau instansi lainnya untuk pengembangan usaha LKMS.
- c. Dapat dikukuhkan menjadi lembaga yang berbadan hukum apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

D. Pengelolaan dan Pengembangan KUBE

Untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan KUBE agar menjadi lembaga yang fungsional dalam memberikan dukungan atas perkembangan usaha anggota KUBE, maka diatur sebagai berikut:

1. Tempat dan Kedudukan

KUBE bertempat dan berkedudukan di tingkat wilayah kelurahan. Dalam satu kelurahan dapat dibentuk KUBE lebih dari satu. Setiap KUBE wajib untuk masuk menjadi anggota LKMS yang berada di wilayah kecamatannya, apabila belum ada, maka bersama-sama dengan peserta UEP yang berada dalam satu wilayah kelurahan, atas bimbingan dan binaan dari pendamping lapangan dan pendamping teknis mengadakan musyawarah pembentukan LKMS.

2. Keanggotaan

Anggota KUBE berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang yang terdiri dari keluarga miskin dan/atau PMKS, dengan kriteria yang ditentukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

3. Kepengurusan

- a. Kepengurusan KUBE sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekertaris, dan bendahara, yang dipilih dalam musyawarah KUBE. Regenerasi KUBE disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Kepengurusan KUBE dipilih oleh dan dari anggota KUBE.
- c. Pengurus KUBE bertugas dan berwenang untuk:
 - 1) Mengajukan proposal kredit/bantuan kepada LKMS atas nama anggota KUBE.
 - 2) Menyeleksi proposal kredit/bantuan yang akan diajukan kepada LKMS.
 - 3) Bersama pendamping teknis melakukan bimbingan dan binaan terhadap anggota KUBE dalm hal pembuatan proposal kredit/bantuan dari kegiatan usaha.
 - 4) Menjalankan fungsi KUBE.
 - 5) Mengambil kebijakan yang dianggap perlu dengan sepengetahuan pendamping teknis.
 - 6) Menjadi perwakilan dalam musyawarah atau kepengurusan LKMS.

d. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Dalam menentukan suatu kebijakan, maka keputusan diambil dalam musyawarah KUBE yang dihadiri oleh seluruh anggota KUBE, pendamping lapangan, dan pendamping teknis.

4. Fungsi

KUBE berfungsi untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota KUBE agar dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial.

5. Pengembangan KUBE

Dalam proses pengembangan KUBE, maka dapat dilakukan:

a. Perekrutan anggota baru KUBE

Untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi KUBE, maka KUBE dapat melakukan perekrutan anggota baru. Yang dapat direkrut sebagai anggota baru KUBE adalah keluarga miskin atau PMKS dan/atau peserta UEP yang direkomendasikan oleh pendamping teknis.

b. Pembentukan KUBE baru

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Sosial dapat membentuk KUBE baru atas usulan dari pendamping g teknis dan/atau LKMS. Yang dapat menjadi anggota KUBE baru adalah keluarga miskin yang belum terjangkau dalam program KUBE.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk KUBE baik dalam hal peningkatan kemampuan produksi maupun dalam hal manajemen pengelolaan dan pengembangan KUBE.

E. Pengelolaan dan Pengembangan UEP

Untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan UEP agar lebih produktif, maka diatur sebagai berikut:

1. Peserta UEP

- a) Yang dapat menjadi peserta UEP adalah PMKS dan/atau fakir miskin, dengan kriteria yang ditentukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- b) Kepesertaan UEP bersifat individu atau perseorangan.

2. Pengembangan UEP

Dalam proses pengembangan UEP, maka dapat dilakukan:

a. Pembentukan/pengembangan KUBE

Untuk meningkatkan produktifitas dan pengembangan usaha peserta UEP, maka atas bimbingan pendamping teknis, peserta UEP dapat:

- 1) Bergabung dengan KUBE yang berada di wilayah kelurahannya dan memiliki kesamaan jenis usaha, atau
- 2) Bergabung dengan peserta UEP lainnya yang berada di wilayah kelurahannya dan memiliki kesamaan jenis usaha, selanjutnya membentuk KUBE baru.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk peserta UEP baik dalam hal peningkatan kemampuan produksi maupun dalam hal manajemen pengelolaan pengembangan UEP.

4.3 Pelaksanaan KUBE di Jakarta Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Departemen sosial bekerjasama dengan Dinas Bintal dan Kesos (Bina Spiritual dan Kesejahteraan Sosial) DKI Jakarta dalam melaksanakan program KUBE di DKI Jakarta. Setiap tahun ada satu Kecamatan dari setiap Kota Administrasi yang akan menjadi daerah pelaksanaan KUBE. Pada tahun 2006, Dinas Bintal Dan Kesos membentuk 200 KUBE pada lima Kota Administrasi yang terdapat di Jakarta. Pada tahun 2009 Jakarta Selatan mendapat kesempatan melaksanakan Program KUBE, Kecamatan Pesanggrahan dipilih menjadi daerah pelaksanaan KUBE di Kota

Administrasi Jakarta Selatan dengan membentuk 20 KUBE yang masing-masing KUBE beranggotakan 10 orang, dan tersebar di empat kelurahan yaitu Kelurahan Ulujami, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Pesanggrahan dan Kelurahan Petukangan Utara. Kedua kelurahan tersebut dipilih dengan pertimbangan karena di Kelurahan lainnya telah mendapatkan bantuan.

Pelaksanaan KUBE di Kecamatan Pesanggrahan diawali dengan perekrutan anggota yang dilakukan oleh Seksi Sosial Kecamatan (SSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang akhirnya mendapatkan data 200 orang yang direkomendasikan untuk menjadi anggota KUBE. Tidak semua orang yang direkomendasikan oleh SSK dan PSM merupakan warga miskin tetapi sudah direncanakan dari 10 orang anggota per KUBE, 3 orang diantaranya merupakan warga tidak miskin atau berada sedikit diatas garis kemiskinan yang diharapkan mampu mengorganisasikan keberlangsungan KUBE. PSM adalah masyarakat yang peduli dan sukarela menjadi penyelenggara/pelaksana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dalam program KUBE ini, hanya beberapa PSM yang terlibat dan ditunjuk menjadi pendamping KUBE.

Data anggota yang berhasil dikumpulkan oleh SSK dan PSM kemudian direkomendasikan kepada Dinas Sosial melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan untuk menjadi peserta program KUBE. Saat perekrutan, masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk memilih bidang usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh anggota masing-masing KUBE serta disesuaikan dengan keahlian yang dikuasai oleh masing-masing anggota. Bidang usaha yang dapat dipilih antara lain: catering, pembuat kue kering, parutan kelapa, menjahit dan steam motor. Dari 20 KUBE yang dibentuk, sebagian besar KUBE berupa KUBE catering yaitu sebesar 11 KUBE, 3 KUBE kue kering, 2 KUBE makanan olahan (nasi uduk betawi dan tahu), 2 KUBE menjahit, 1 KUBE sembako dan 1 KUBE sablon/Laundry. Semua KUBE yang terbentuk memperoleh bantuan berupa uang dalam bentuk transfer ke bank-bank yang telah ditunjuk sebelumnya. Uang tunai untuk masing-masing KUBE sebesar Rp 20.000.000 tetapi dikenakan potongan sebesar Rp 250.000 sebagai tabungan wajib di LKMS agar KUBE merasa terikat dengan LKMS sehingga dapat melakukan

kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam urusan pemasaran dan terutama dalam permodalan. Berikut kutipan wawancara dengan informan dari dinas sosial.

“.....masing-masing kube dapat 20 juta. Jadi masing-masing anggota sebenarnya dapat 2 juta. Kemudian ada iuran lagi sebesar seribu setiap harinya”

Pelaksanaan KUBE di Kecamatan Pesanggrahan sejak 2008 hingga 2010 belum seluruhnya berjalan baik, Misalnya KUBE catering hanya melayani pesanan pada acara-acara tertentu dan belum memiliki pasar yang pasti. Pelaksanaan KUBE di lapangan tidak sepenuhnya berjalan seperti yang direncanakan. Ada beberapa KUBE yang tidak dijalankan secara berkelompok tetapi dijalankan secara individu. KUBE yang dijalankan secara individu hanya memanfaatkan KUBE sebagai sarana akses untuk simpan pinjam, bukan sebagai pengembangan usaha keuangan bersama.

Hal ini menyimpang dari rencana pembuatan KUBE yang dibentuk menjadi sebuah organisasi yang menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dan memanfaatkan LKMS sebagai sarana simpan pinjam. Penyimpangan ini terjadi karena lokasi beberapa KUBE yang tidak berdekatan dengan LKMS sehingga KUBE-KUBE tersebut segan untuk datang dan menjalin kerjasama dengan LKMS. Selain itu, lokasi yang berjauhan mengakibatkan KUBE-KUBE tidak mendapatkan informasi terbaru dari LKMS. Tidak semua KUBE dapat berlangsung dan berkembang dengan lancar. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain: ada beberapa KUBE yang kehilangan peralatan usaha akibat banjir yang melanda daerah tempat tinggal mereka, KUBE steam motor tidak berjalan disebabkan anggota KUBE memiliki kesibukan lain di luar KUBE dan KUBE kue kering mengalami hambatan untuk berkembang sebab kesulitan dalam pemasaran produk mereka.

Setiap KUBE memiliki seorang pendamping yang akan membantu dalam keberlangsungan KUBE serta sebagai usaha monitoring dari Dinas. Namun tidak setiap pendamping menangani satu KUBE tetapi seorang pendamping dapat menangani 2 sampai 5 KUBE yang lokasinya berada pada daerah yang

berdekatan. Bahkan ada beberapa pendamping yang bertindak sebagai ketua dari KUBE yang ditangani. Kegiatan pendampingan sampai saat ini belum mencakup kegiatan peningkatan skill dan kreatifitas anggota KUBE. Kegiatan pendampingan hanya mencakup pemberian saran dan masukan ketika KUBE mengalami kesulitan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Erna sebagai salah satu anggota dan pengurus KUBE.

“Kalo saya gak salah inget ya mbak, mereka itu melakukan pendampingan untuk setiap KUBE sampai bisa berjalan sendiri. Dalam artian mereka membimbing, dilihat perkembangannya, terus bantu buat strategi. Dulu pendamping disini juga sebagai ketua mbak.”

Berdasarkan hal tersebut maka pendampingan yang selama ini ada di beberapa KUBE hanya berjalan sebagai media formalitas saja. Pendampingan kegiatan KUBE hanya dijalankan selama awal mula KUBE itu terbentuk.

4.3.1 Identifikasi KUBE di Jakarta Selatan

Dilihat dari sifat kegiatan usaha, KUBE perlu dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu: (a) KUBE Harian, seperti: usaha dagang sembako, dagang kue, dengan sasaran: masyarakat kelompok fakir; non fakir dan miskin (b) KUBE Bulanan, seperti: tanaman sayur-mayur, ternak ikan, dengan sasaran: masyarakat kelompok non fakir dan miskin; (d) KUBE Tahunan, seperti: usaha ternak sapi, kambing, dengan sasaran: masyarakat kelompok miskin. Sebagian besar jenis usaha KUBE termasuk kategori KUBE Harian.

Berdasarkan 3 (tiga) jenis KUBE Jakarta selatan memiliki ketiga jenis kegiatan tersebut dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Tabel 4.4
Data KUBE di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

No	Nama KUBE	Jenis Usaha	Jumlah Anggota	Alamat Sekertariat
1	BELIBIS	Katering	10	Jl.H. Buang Raya rt. 003/07 kel. Ulujami telp. 0812-10488-058
2	SEJATI	Nasi uduk betawi	10	Jl. Bintaro permai (samping pasar pesanggrahan) kel pesanggrahan
3	IKHTIAR	Kue-kue	10	Jl. Ulujami, Gg. Pancoran no.04 rt.007/01 kel pesanggrahan telp. 02197528414
4	Lumba-lumba	Katering/menjahit	10	Jl.kramat rt. 009/04 kel. Ulujami telp. 021 40279157
5	KETILANG	Makanan olahan (tahu)	10	Jl. Halimah rt. 004/03 no 79. Kel. Ulujami telp. 021-97283030
6	MANDIRI 2	Menjahit	10	Jl. H.rohimin rt. 017/03 kel. Ulujami tlp. 021-94077340
7	KELELAWAR	Katering	10	Jl. Tabah rt.009/03 kel. Ulujami . tlp 081213752402
8	BERUANG	Katering	10	Jl. Tabah rt. 015/03 kel ulujami. Tlp 021-5858560

No	Nama KUBE	Jenis Usaha	Jumlah Anggota	Alamat Sekertariat
9	GAJAH	Katering	10	Jl. Kp. Baru VI rt.009/02 kel. Ulujami. Tlp. 021- 95317761
10	MERAK	Katering	10	Jl. H. Syatiri no 17 rt. 012/03 kel. Ulujami
11	PERMAI	Kue kering	10	Jl. Bintaro permai rt.002/10 kel. Bintaro telp. 021-7375059
12	MAWAR MERAH	Kue	10	Jl. Mawar III rt.004/05. Kel bintaro kec pesanggrahan, jaksel. Telp. 021-93771578
13	HIDAYAH	Makanan/sembako	10	Jl. Masjid al-muflihun tr.002/010 kel bintaro
14	BINA USAHA	Sablon/laundry	10	Jl.swadarma raya,kp. Barut rt.007/02 tlp. 021- 9884392
15	HASYANAH	Menjahit	10	Jl. Ulujami,Gg pancoran rt 007/01 kel. Pesanggrahan telp 021- 7350180
16	SOKA	Katering	10	Jl.AMD V rt.003/10 kel. Pet. Utara. Tlp. 021- 5859007 08159138991
17	TULIP	Katering	10	Jl.AMD V rt. 006/010 Gg. Saiyan II pet. Utara

No	Nama KUBE	Jenis Usaha	Jumlah Anggota	Alamat Sekertariat
18	KATELIA	Katering	10	Jl. H. Dul rt. 06/01 kel. Pet. Utara tlp. 021- 5860293 087885719000
19	NUSAINDAH	Katering	10	Jl. M. Darul falah rt.005/010 no.7 petukangan utara tlp. 08179901173
20	MERPATI	Katering	10	Jl.kp. baru VI rt. 012/02 kel. Ulujami tlp. 021- 99024118

Sumber: Data Sekunder, 2012

Dari tabel diatas dapat terlihat ada 20 KUBE di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dari keduapuluh kelompok usaha tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis-jenis KUBE dengan kategori pendapatan yang dihasilkan oleh anggotanya. Jenis KUBE Harian dengan kegiatan katering adalah jenis kelompok usaha bersama yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Pelaksanaan kelompok usaha bersama di Jakarta Selatan mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Sejak tahun itu, jumlah KUBE meningkat seiring dengan adanya sosialisasi dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial terkait.

Implementasi program ini dimulai dengan adanya suatu analisis tentang bagaimana kondisi kemiskinan yang ada di wilayah tersebut dalam kasus ini adalah wilayah Jakarta Selatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah masyarakat miskin di wilayah ini adalah sebesar 73.700 jiwa atau bisa dikatakan 21,7% penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta tinggal di Jakarta Selatan. Kondisi ini dikerucutkan ke dalam jumlah penduduk yang tidak bekerja sebanyak 34,6% penduduk berusia diatas 15 tahun. Untuk penduduk yang berusia diatas 15 tahun dengan pekerjaan di sektor informal sebesar 31.8% dan 33,6%

bekerja di sektor informal (Data BPS tahun 2009). Analisis tentang kondisi tersebut maka wilayah Jakarta Selatan diberikan kesempatan untuk membentuk kelompok usaha bersama dalam bidang yang bisa dilakukan oleh mayoritas penduduk.

Dinamika kehidupan KUBE di Jakarta Selatan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor karakteristik individu anggota KUBE: (a) tingkat pendidikan anggota KUBE, (b) modal awal yang dimiliki, (c) pelatihan yang diikuti anggota, (d) motivasi anggota. Semakin baik karakteristik yang dimiliki oleh anggota KUBE maka pelaksanaan usaha ini berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari sejauh mana pengetahuan dan pelatihan serta kemampuan individu dalam mengembangkan usaha mereka secara bersama. Faktor pola pemberdayaan: (a) proses pendampingan, (a) bantuan yang diterima, (c) proses pembentukan KUBE pada awalnya. Faktor lingkungan sosial KUBE: (a) norma dan nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, (b) peluang atau ketersediaan pasar yang ada, (c) keterkaitan dan hubungan KUBE dengan tokoh formal dan informal yang ada dalam masyarakat, (d) jaringan kerjasama yang dibangun.

Mekanisme penyelenggaraan kelompok usaha bersama dijalankan berdasarkan keputusan Menteri Sosial. Mekanisme Penyaluran Bantuan dilakukan dari Kementerian Sosial menggunakan Anggaran Pusat melalui APBN. Dana tersebut kemudian diberikan kepada dinas sosial setiap wilayah untuk disalurkan melalui kecamatan-kecamatan. Pengadaan barang dan jasa secara partisipatif akan dilakukan oleh anggota KUBE sendiri. Kementerian Sosial memandang perlunya merumuskan langkah-langkah yang tepat agar tujuan penyaluran Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dapat dilakukan secara tepat dan dimanfaatkan secara efektif oleh KUBE. Pada tahun 2007, Kementerian Sosial melakukan pembaharuan internal kementerian atau yang dikenal dengan *reinventing* Kemensos. Adapun *reinventing* itu sendiri bahwa Kemensos akan melakukan perubahan dalam bentuk: (1) reorientasi kebijakan pada pembangunan manusia, (2) restrukturisasi organisasi untuk menjalankan dan mencapai tujuan kebijakan secara efektif, (3) pengembangan aliansi strategis dengan mitra kerja yang mempunyai kapasitas sesuai bidangnya, (4) perbaikan tata kelola

pelaksanaan kebijakan, (5) penilaian kinerja program, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan kesempatan kerja, keuntung bagi yang bekerja, dan akumulasi tabungan bagi yang bekerja dan menabung.

Pembaharuan program tersebut merupakan upaya Kementerian Sosial untuk menjadikan institusinya sebagai excellent ministry atau Kementerian unggulan (Pedum Tim Koordinasi BLPS, 2007:3). Dan untuk menjadi Kementerian unggulan tersebut, maka Kemensos perlu semakin terbuka untuk bekerjasama dengan semua mitra pembangunan, baik dari kalangan dunia usaha/swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para cendekiawan dan praktisi untuk bersama-sama mengembangkan Kemensos sebagai ujung tombak pencapaian target pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

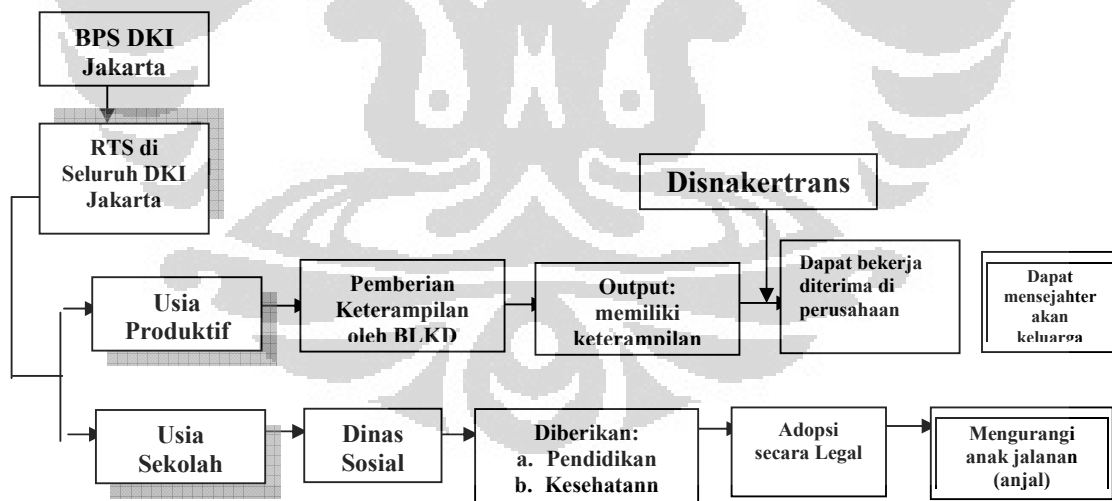
Kementerian Sosial menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan dulu dikenal dengan: pengentasan kemiskinan- melalui program Kelompok Usaha Bersama atau KUBE. Program KUBE merupakan pengejawantahan Instruksi Presiden tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau Gerdu Taskin. Pola pemberdayaan KUBE yang diterapkan oleh Kementerian Sosial selama ini sangat seragam, kurang menekankan pada unsur-unsur lokal setempat. Jumlah kelompok sebanyak 10 Kepala Keluarga. Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tetapi berupa paket usaha yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti peralatan bengkel, ternak sapi, peralatan-peralatan pertanian, dan lain-lain. Pemberian bantuan ini diawali dengan pembekalan pengembangan keterampilan usaha seadanya. Jenis paket usaha yang dikembangkan dianjurkan untuk memilih jenis usaha sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber di daerah masing-masing, namun pelaksanaannya lebih mengacu pada kondisi pengadministrasian yang harus dipertanggung jawabkan.

4.3.2 Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan diberikan kepada anggota KUBE sebelum dan pada saat kelompok usaha tersebut sudah terbentuk. Badan Latihan Keterampilan Daerah adalah lembaga yang memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh anggota kelompok usaha. Balai latihan keterampilan daerah (BLKD) merupakan bagian

dari unit kerja perangkat daerah (UKPD) yang akan bertugas atau berfungsi memberikan pelatihan bagi warga Jakarta yang termasuk dalam Rumah Tangga Sederhana (RTS). Pada umumnya, BLKD ini merekrut warga sasaran dari RTS yang dikelompokkan dalam usia produktif dan usia sekolah. Tujuan dari BLKD ini adalah memberikan pelatihan dan keterampilan bagi warga RTS yang masuk dalam usia produktif dan warga RTS yang masuk dalam kelompok usia sekolah.

Bagi warga usia produktif akan diberikan keterampilan sehingga dapat bekerja, sedangkan bagi warga usia sekolah akan dibina dalam oleh Dinas Sosial untuk diberikan pendidikan, dan kesehatan untuk kemudian diadopsi secara legal. BLKD yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah diberikan pelatihan oleh BLKD ke seluruh perusahaan-perusahaan swasta atau pemerintah. Untuk memahami kebijakan program pelatihan di seluruh BLKD di DKI Jakarta, berikut digambarkan alur strategi BLKD dalam upaya penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta, sebagai berikut:



Gambar 4.3
Badan Latihan Kerja Daerah

Sumber: data sekunder, 2012

Untuk memberikan keterampilan bagi warga RTS di seluruh wilayah DKI Jakarta, maka seluruh BLKD yang ada di lima wilayah Jakarta Selatan diberdayakan secara optimal, berkoordinasi dan terintegrasi dengan Disnakertrans yang dimaksudkan untuk menyalurkan lulusan BLKD kepada dunia usaha atau industri (perusahaan) dengan cara demikian akan dapat mengurangi pengangguran dan dapat mensejahterakan keluarganya, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan.

Pelatihan diberikan oleh dinas sosial Jakarta terkait dengan kegiatan usaha apa yang akan dilaksanakan. Pelatihan ini diberikan dalam rangka meningkatkan kreativitas dari anggota KUBE. Peningkatan kreatifitas masyarakat dengan pelatihan-pelatihan. Pemberian bantuan KUBE tanpa dilengkapi dengan kreatifitas hanya akan membuat usaha yang diharapkan berkembang menjadi macet ditengah jalan. Pengembangan usaha bukan hanya bermodal aset tetapi juga memerlukan modal keterampilan dan kreatifitas untuk dapat mengantisipasi berbagai kendala yang akan datang ditengah usaha sedang berjalan. Dalam kenyataannya, pelatihan yang ada dirasa sangat kurang oleh anggota KUBE. Pelatihan hanya diberikan sebatas pola dasar tanpa menyentuh bagian terpenting yaitu bagaimana membuat usaha tetap berjalan lancar dan bisa bersaing dengan kompetitor. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Endah sebagai anggota KUBE BELIBIS.

“...ada pelatihan tapi cuma begitu aja. Kami disini juga merasa perlu banget dapet pelatihan lebih mendalam. Misalnya soal pemasaran yang baik. Ajarin bikin kemasan yang berbeda ama katering yang lain...”

Pendampingan adalah mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh PSK yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Panita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS). Pendamping dibagi menjadi dua jenis yaitu pendamping teknis dan pendamping lapangan. Pendamping teknis adalah orang yang bertanggung jawab atas

berjalannya KUBE secara teknis biasanya berasal dari kelurahan dan kecamatan setempat. Pendamping lapangan adalah orang yang memberikan motivasi serta pengawasan dari eksternal. Untuk pendamping ini biasanya adalah orang yang mempunyai pengaruh besar di lingkungan tersebut misalnya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Pendamping lapangan ini juga dipilih berdasarkan kemampuan ekonomi yang sudah berada di atas rata-rata. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Irwan Santoso selaku Kepala Seksi Dayasos sebagai berikut.

“...kalo pendamping itu ada dua mba. Teknis dan lapangan. Dua-duanya punya andil masing-masing dan kriteria masing-masing, hanya saja punya beberapa kesamaan yaitu sama-sama melakukan control terhadap KUBE itu sendiri”

4.3.3 Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah diimplementasikan wilayah Jakarta Selatan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2009. Kecamatan Pesanggrahan sebagai *pilot project* implementasi Kube di Jakarta Selatan dapat memberikan gambaran bagaimana kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang harus ditanggulangi oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Sasaran pemberdayaan itu adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sasaran jangka panjang kedua sasaran ini ditegaskan kembali dengan menggaris bawahi terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju, moderen dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program ini berdasarkan teori maka analisis akan dilakukan menggunakan teori dari Mazmanian & Sabatier.

Teori tersebut menyatakan tentang model Kerangka Analisis Implementasi *Framework for Implementation analysis*. Teori ini menyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik dari masalah (*Trackability of the problem*), sebuah karakteristik kebijakan (*Ability of statute to structure implementation*) dan lingkungan kebijakan (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*).

4.3.3.1 Karakteristik dari Masalah (*Trackability of the Problem*)

1. Tingkatan Kesulitan Teknis dari Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai adanya gap antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Kebijakan program Kelompok Usaha Bersama di Jakarta Selatan dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang lain. Kemiskinan menjadi dasar dalam terbentuknya kebijakan ini. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sulit dipecahkan. Masalah kemiskinan kemudian berkembang menjadi masalah yang holistik yang meliputi ekonomi, sosial, pendidikan, dan masalah lainnya. Kondisi kemiskinan di Jakarta khususnya di Jakarta Selatan.

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2009 sebesar 323,17 ribu orang (3,62 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2008 sebesar 379.6 ribu orang (4,29 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 57,45 ribu (0,67 persen). Keadaan ini dapat terjadi karena salah satu penyebabnya adalah adanya deflasi pada bulan Januari sampai Maret sebesar 0,13%. Dari data BPS pula dapat dikatakan bahwa kemiskinan dari tahun-ketahun secara umum dikatakan meningkat. Selain itu, peningkatan jumlah angka kemiskinan di Jakarta disebabkan oleh adanya peningkatan Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta terjadi peningkatan dari 972.645 rupiah pada tahun 2008 menjadi 1.069.865 rupiah pada 2009. Peningkatan UMP ini pada akhirnya menyebabkan adanya peningkatan hidup dari masyarakat. Tingkat ketepatan pembagian raskin kepada rumah tangga miskin meningkat.

Kebijakan program Kelompok Usaha Bersama di Jakarta merupakan suatu bentuk dari usaha pemerintah untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Jakarta.

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Beberapa penyebab seperti laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, selain itu bencana alam, serta konflik yang berkepanjangan. Untuk wilayah Jakarta pada umumnya, laju pertumbuhan penduduk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Data badan pusat statistik DKI Jakarta menunjukkan laju pertumbuhan penduduk dari 2000 hingga 2010 di ibukota mencapai 1,40% pertahun. Berbeda laju pertumbuhan dari 1990 hingga 2000 yang cuma 0,17% pertahun. Diantara semua wilayah di DKI , kepulauan seribu laju pertumbuhan penduduknya paling tinggi 2,02% petahun. Sedangkan laju yang terendah adalah Jakarta Pusat 0,27% pertahun. Disusul 4 wilayah lainnya dengan rata rata pertumbuhan penduduknya diatas 1,4 pertahun.

Hasil sensus penduduk pada 2010 menunjukkan penduduk Jakarta sudah mencapai 9.588.198 jiwa. Kepadatan rata rata penduduknya sebesar 14.470 jiwa perkilo meter persegi. Kalau dikalkulasi dari total jumlah penduduk yang baru maka Jakarta bisa bertambah sebanyak 134.234 jiwa pertahun. Dampak dari ledakan penduduk Indonesia antara lain menimbulkan kemiskinan, menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti menurunnya kualitas pemukiman dan menurunnya kesejahteraan rakyat sampai menurunnya kualitas sumber daya manusia yang dapat menghambat perkembangan Negara Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jakarta mencapai 9,58 juta. Kepadatan rata rata penduduknya sebesar 14.470 jiwa km persegi. Kalau di kalkulasi dari total jumlah penduduk yang baru. Jakarta bisa bertambah 134.234 jiwa pertahun, sedangkan jumlah penduduk di wilayah Jakarta, bogor, depok, tanggerang dan bekasi JABODETABEK mencapai 26,6 jut. Jumlah penduduk jabodetabek tersebut setara dengan jumlah penduduk di 4 negara : Australia 20,8 juta, Singapura 4,4 juta jiwa. Timor leste 1,1 juta jiwa dan Brunai Darussalam 0,39 juta jiwa.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Jakarta sebagai ibukota negara memiliki daya tarik tersendiri bagi semua masyarakat baik dari kota-kota satelit maupun seluruh penduduk Indonesia. Jakarta yang merupakan salah satu

ukuran kesejahteraan bagi semua orang membuat banyak penduduk desa yang melakukan urbanisasi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial di Jakarta. Berdasarkan itulah, banyak sekali angkatan kerja yang ada di Jakarta. Hal ini tidak diseimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi seperti ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah Jakarta. Data pusat statistik DKI Jakarta menyebutkan bahwa pada bulan Agustus 2011 secara keseluruhan angkatan kerja mengalami perubahan dibandingkan keadaan Februari 2011. Pada bulan Agustus 2011, jumlah angkatan kerja tercatat 5,14 juta orang, bertambah sebanyak 134,00 ribu orang bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2011 sebanyak 5,01 juta orang.

2. Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran

Seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan. Penduduk yang bekerja bertambah dari 4,47 juta orang pada Februari 2011 menjadi 4,59 juta orang pada Agustus 2011 atau terjadi peningkatan 121,30 ribu orang. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja terutama terserap ke sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, dan beberapa sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan dan jasa-jasa.

Gambaran struktur ketenagakerjaan keadaan Agustus 2011 di Provinsi DKI Jakarta di seluruh kabupaten/kota administrasi memiliki variasi yang relatif kecil. Struktur ketenagakerjaan yang dimaksud adalah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk bekerja, pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Pada bulan Agustus 2011, angkatan kerja terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur yaitu 1.432,12 ribu orang, disusul Kota Jakarta Barat sebesar 1.228,45 ribu orang, dan Kota Jakarta Selatan yaitu 1.103,39 ribu orang. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara angkatan kerjanya di bawah satu juta orang.

Penduduk bekerja terbanyak terdapat di Jakarta Timur yaitu 1.275,32 ribu orang, dan di Kota Jakarta Barat yaitu sebanyak 1.096,82 ribu orang. Selanjutnya

Kota Jakarta Selatan sebesar 989,10 ribu orang. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara, jumlah penduduk bekerjanya di bawah 800 ribu orang.

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dampak lain yang lebih buruk. Kemiskinan pada dasarnya adalah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penjelasan tersebut jelas dikatakan adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dampak kemiskinan pada akhirnya menyebabkan adanya ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti pendidikan dan tempat tinggal.

Penjelasan mengenai karakteristik yang menjadi latar belakang kebijakan ini adalah kemiskinan. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Hal ini juga bisa menjadi angin segar bagi masyarakat untuk bisa belajar dan bisa berdiri dengan kaki mereka untuk membentuk sebuah usaha yang kemudian dikelola secara bersama dengan tidak mengeluarkan modal.

Jakarta dengan tingkat kemiskinan yang cukup besar sangat sadar dengan kondisi tersebut. Akhirnya pada tahun 2007, kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan program Kementerian Sosial dilaksanakan di DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi *pilot project* program ini.

Tujuan pelaksanaan program ini di Jakarta salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran yang pada akhirnya adanya peningkatan taraf hidup dari anggotanya. Selain itu kegiatan ini juga bisa membantu anggotanya untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli sembako dan membiayai sekolah anak. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Ibu Endang sebagai berikut.

“Saya kan rakyat kecil, gaji bapak suka gak cukup buat hidup sehari-hari. Belum lagi bayarin anak sekolah. Anak saya 3 masih kecil dan butuh dana buat bayaran sekolah. Lumayan dari pada bengong di rumah gak ngapain jadi saya ikutan aja disini”

Selain itu, kegiatan ini bisa membantu peningkatan penghasilan keluarga. Misalnya membantu suami dalam mencari nafkah. Berikut kutipan wawancaranya.

“Pastinya manfaat seperti itu yang saya rasakan, bisa memiliki penghasilan lain selain gaji suami itu manfaatnya. Setidaknya saya bisa meringankan beban suami untuk bisa kasih uang jajan buat anak. Jadi kalo suami saya kerja untuk bayar sekolah anak, ya saya kerja buat jajan anak. Adil kan jadi lebih ringan gitu mbak. Apalagi kalau dagangan saya laris perputaran uangnya kan jadi lancar ”

3. Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Populasi

Piramida penduduk Jakarta Selatan pada tahun 2010 memperlihatkan bahwa Jakarta Selatan memiliki struktur penduduk muda. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk usia produktif, yakni mereka yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Penduduk usia produktif meliputi 73,04 persen dari jumlah penduduk Jakarta Selatan. Dari penduduk usia produktif tersebut terbanyak berada pada rentang usia 20 hingga 34 tahun yang mencapai 43,67 persen. Dengan jumlah usia produktif yang cukup tinggi, angka beban tanggungan atau *dependency ratio* Jakarta Selatan relatif kecil. *Dependency ratio* di Jakarta Selatan hanya sebesar 36.92 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 37 orang penduduk usia tidak produktif.

Kepadatan Penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi. Rasio Jenis Kelamin adalah Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makan dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah Tangga. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola

bersama-sama menjadi satu. Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Rata-rata Anggota Rumah Tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Jakarta Selatan

Kecamatan/ District	Luas*/ Area (km ²)	Penduduk Hasil SP2010/ Population			Kepadatan/ Density	Sex Ratio
		Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1. Jagakarsa	24,87	158 343	151 877	310 220	12 474	104 26
2. P.s. Minggu	21,69	146 688	141 043	287 731	13 266	104 00
3. Cilandak	18,16	94 343	95 063	189 406	10 430	99 24
4. Pesanggrahan	12,76	107 962	103 799	211 761	16 596	104 01
5. Keb. Lama	16,72	148 291	145 355	293 646	17 563	102 02
6. Keb. Baru	12,93	70 564	71 150	141 714	10 960	99 18
7. Mp. Prapatan	7,73	72 954	68 905	141 859	18 352	105 88
8. Pancoran	8,63	74 777	73 195	147 972	17 146	102 16
9. Tebet	9,03	103 934	105 107	209 041	23 150	98 88
10. Setia Budi	8,85	65 819	63 063	128 882	14 563	104 37
Jumlah/Total	141,37	1 043 675	1 018 557	2 062 232	14 587	102.47

Sumber/Source: Sensus Penduduk 2010 (SP2010)

*)Berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 171/2007

Tanggal 22 Januari 2007

4.3.3.2 Karakteristik Kebijakan

1. Kejelasan Isi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier dalam model kerangka Analisis Implementasi atau lebih dikenal dengan *Framework for Implementation Analysis*, karakteristik kebijakan menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan agar sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Karakteristik kebijakan ini bisa dirinci lagi menjadi tujuh point yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan tersebut

memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, besarnya dukungan dari berbagai pihak terkait, kejelasan dan konsistensi aturan, tingkat komitmen terhadap tujuan kebijakan, dan partisipasi dari pihak luar yang menjadi objek dari kebijakan.

Program Kelompok Usaha Bersama sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui kelompok masyarakat telah tercantum dalam beberapa peraturan baik yang dikelarkan oleh pemerintah ataupun dari Kementerian terkait dalam hal ini adalah Menteri Sosial. Untuk program ini telah ditulis dalam beberapa peraturan yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 dan Nomor 8 tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/PENGHUK/2002 tentang penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI.

Dalam peraturannya diturunkan lagi menjadi sebuah pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dalam pedoman ini tertulis jelas adanya definisi dari KUBE, sasaran dan tujuan dari program ini serta bagaimana kegiatan ini dibuat sampai dikembangkan. pemberdayaan merupakan upaya penyediaan berbagai sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan masa depannya dan untuk dapat berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan komunitas mereka. Wujudnya dengan menyediakan berbagai sumber yaitu berupa alat-alat yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini. Untuk Jakarta Selatan sendiri, bantuan yang diberikan berupa alat-alat masak karena sebagian besar dari Kelompok Usaha yang terbentuk berada di bidang catering atau tata boga berupa kue kering.

2. Besarnya Alokasi Sumber Daya Finansial terhadap Kebijakan

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya. Setiap kelompok usaha bersama diberi dana hibah sebesar 2 juta rupiah pada awal pembentukannya. Dana ini diberikan secara cuma-cuma oleh dinas sosial sebagai bentuk dukungan. Dalam proses pemberdayaan ini para anggota KUBE mengakui terlebih dahulu diberikan pelatihan sebelum bantuan diberikan. Pelatihan yang diberikan berkaitan dengan keterampilan teknis pengelolaan KUBE. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang terlebih dahulu dimasukkan dalam rekening BRI, kemudian masing-masing anggota diberi wewenang untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan proposal dan kebutuhan yang mereka usulkan sebelumnya. Pengelolaan juga merupakan hal yang penting dalam proses pemberdayaan. Pengelolaan harus dilakukan secara terbuka dan bentuk pengelolaannya harus dilakukan atas kesepakatan bersama, tidak bisa hanya dilakukan secara sepihak oleh pengurus atau ketua.

Selain dana yang berasal dari kementerian, pendanaan dapat bersumber dari anggota KUBE itu sendiri. Nama dana tersebut adalah IKS. Sumber IKS antara lain sebagai berikut:

- a. Anggota KUBE minimal sebesar Rp. 1000,- per hari, dengan pembagian Rp. 500,- untuk disimpan dan dikelola oleh KUBE, dan Rp. 500,- untuk disimpan dan dikelola oleh LKMS.
- b. Peserta UEP minimal sebesar Rp. 1000,- per hari yang disimpan dan dikelola oleh LKMS.
- c. Persentase keuntungan usaha LKMS sebesar 40% dari jumlah total keuntungan usaha LKMS.

Pembayaran IKS dilakukan setiap hari oleh anggota KUBE kepada bendahara. Dana IKS yang disimpan dan dikelola oleh LKMS dipergunakan dengan ketentuan yaitu sebesar 40% digunakan untuk bantuan bagi anggota LKMS/KUBE/UEP yang terkena musibah dengan besar bantuan disesuaikan

dengan ketersediaan dana. Sebesar 30% digunakan untuk tambahan dana bagi kredit/bantuan yang akan disalurkan kepada KUBE atau peserta UEP sebagai pinjaman. Sebesar 30% digunakan untuk dukungan operasional LKMS.

3. Tingkat Komitmen Aparat

Pendamping bukanlah unsur pelengkap dalam proses pemberdayaan tersebut tetapi melakukan banyak peran seperti fasilitator, motivator, edukator, mediator, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pelatihan diberikan kepada pendamping. Mereka bertugas sebagai pendamping hanya didasarkan pada pengalaman dan kemampuan mereka yang ada selama ini. Bila pelatihan tidak ada, mungkin alternatif yang dapat dilakukan adalah merekrut orang yang lebih berpengalaman atau profesional sesuai dengan bidangnya. Dilihat dari hakekatnya, bahwa bantuan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan, di mana persoalan mereka adalah pemenuhan makan hari ini bukan makan hari esok. Bantuan yang diberikan baru dapat menghasilkan setelah 1 sampai 2 tahun lagi, sehingga bantuan ini dianggap kurang relevan.

Pelatihan yang diadakan sangat terbatas dan kurang menyentuh substansi yang harus diberikan. Pelatihan hanya berupa sosialisasi. Dampaknya keterampilan dan komitmen mereka menjadi kurang maksimal. Demikian juga dengan pelatihan terhadap pendamping sama sekali tidak diberikan, padahal mereka adalah warga setempat yang terbatas kemampuan dan pengalaman di bidang kuliner. Pelatihan hanya diberikan kepada pendamping dengan tenggang waktu selama 2 bulan sekali. Setiap anggota kemudian mendapatkan pelatihan dari hasil pelatihan pendamping. Berikut kutipan wawancaranya.

“..yang dapat pelatihan dari dinsos itu pendampingnya mbak. Nah, dari pendamping itu nantinya disampaikan sama anggota kelompok usahanya itu.....”

Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat dalam melaksanakan tugas pekerjaan atau program-program. Kementerian Sosial sebagai pihak yang

memiliki program ini telah mendelegasikan wewenangnya kepada dinas sosial terkait untuk dapat turun langsung bertemu dengan masyarakat yang membutuhkan. Komitmen ini dilakukan dalam bentuk melakukan pendampingan dan juga pelatihan kepada anggota KUBE yang bersedia bergabung dengan kegiatan ini. Akan tetapi beberapa kelompok yang terbentuk bukan dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat akan usaha tersebut. Beberapa kelompok dibentuk oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan agar dana bisa keluar dan digunakan secara tidak benar atau dengan kata lain tidak sesuai dengan tujuan awalnya.

4. Akses Kelompok Luar terhadap kebijakan

Salah satu unsur dalam suatu implementasi kebijakan berjalan dengan baik adalah dengan adanya akses kelompok di luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya akan relatif mendapatkan dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya. Keterlibatan warga di Jakarta Selatan sangat dirasakan kurang besar. Hal ini disebabkan kegiatan yang ada tidak disosialisasikan secara berkelanjutan dan hanya pihak-pihak tertentu yang tahu tentang program ini. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa program ini merupakan program baru dan masih perlu digalakkan lebih besar agar masyarakat dapat aktif. Selama ini, dinas sosial lah yang aktif tanpa adanya feedback dari masyarakat secara cepat. Butuh suatu proses lain agar mereka merasa yakin bahwa ini adalah suatu program yang bisa menjawab pertanyaan mereka selama ini.

4.3.3.3 Lingkungan Kebijakan

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Selain karakteristik dari masalah dan juga kebijakan, lingkungan tempat dilaksanakan kebijakan tersebut menjadi salah satu unsur yang bisa dijadikan

indikator tentang pelaksanaan suatu kebijakan bisa berjalan atau tidak. Pengaruh lingkungan seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi sebuah program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

PDRB per kapita Jakarta Selatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 selalu meningkat. Bahkan pada tahun 2010 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 87 juta lebih atau naik 11,33 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 78 juta lebih. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan dari beberapa indikator produksi dari berbagai sektor ekonomi disamping faktor kenaikan harga (inflasi). Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 pada periode tahun 2006-2010 juga selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 PDRB per kapita mencapai Rp. 40 juta lebih atau naik sebesar 5,75 persen dibanding tahun 2009. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan riil sektor ekonomi yang mengabaikan faktor inflasi pada masa yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2001-2010, ternyata rata-rata pertumbuhan ekonomi Jakarta Selatan sebesar 5,65 persen lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 5,67 persen. Namun demikian karena merupakan bagian dari ibu kota Negara Republik Indonesia dan sentral berbagai kegiatan ekonomi, Jakarta Selatan memberi arti penting bagi pengembangan perekonomian DKI Jakarta khususnya dan secara umum perekonomian nasional.

Kegiatan perdagangan di Jakarta selatan memiliki sirkulasi yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan untuk wilayah Jakarta Selatan setiap tahunnya bertambah. Ini membuktikan bahwa Jakarta Selatan dapat menjadi tempat yang

sangat strategis dalam melaksanakan aktivitas perdagangan. Data dari Sudin Koperasi, UMKM Administrasi Jakarta Selatan mencatat pada tahun 2006 terdapat 2.308 SIUP yang diedarkan. Tahun 2010 jumlah SIUP yang diedarkan mengalami kenaikan menjadi 4.435 SIUP. Berikut adalah tabel rinciannya.

Tabel 4.6

Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Bulan/ <i>Month</i>	Tahun / <i>Years</i>				
	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
Januari/ <i>Jan.</i>	183	190	256	99	260
Februari/ <i>Feb.</i>	204	160	260	247	318
Maret/ <i>March</i>	245	190	285	248	364
April/ <i>April</i>	160	210	334	160	386
Mei/ <i>May</i>	211	201	325	192	343
Juni/ <i>June</i>	281	196	271	195	481
Juli/ <i>July</i>	194	187	275	313	307
Agustus/ <i>Aug</i>	183	169	275	239	393
September/ <i>Sept</i>	188	187	250	208	309
Oktober/ <i>Oct</i>	131	166	207	282	393
November/ <i>Nov</i>	169	207	211	257	442
Desember/ <i>Dec</i>	159	170	293	388	439
Jumlah/Total	2 308	2 233	3 242	2 828	4 435

Sumber/Source: Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kegiatan perekonomian tidak lepas dari kegiatan industri. Walaupun lokasi area Jakarta Selatan berada di pusat kota, kegiatan industri masih bisa dijalankan.

2. Komitmen dan Keterampilan aparat dan Implementator

Selama implementasinya program Kelompok Usaha Bersama memiliki kekuatan dan juga kelemahan dalam perjalanannya. Kekuatan seperti Adanya pengalaman anggota KUBE dalam pengelolaan jenis usaha yang dikembangkan sekarang ini. Adanya bantuan modal yang diberikan kepada anggota KUBE bila

disatukan akan menjadi modal yang kuat, karena itu pembinaan dalam kelompok menjadi salah satu aspek yang harus dipertahankan. Masih berkembangnya budaya kerjasama dan gotong-royong dalam kehidupan anggota KUBE, terlihat. Selain itu, adanya pengelolaan jenis usaha yang bersifat individu dan kelompok (namun pembinaan tetap dalam kelompok). Kedua cara ini masing-masing mempunyai keuntungan dan kelemahan. Karena itu untuk menilainya harus memahami kehidupan kelompok tersebut. Anggota KUBE merasa tenang karena ada harapan akan kehidupan yang lebih baik dari modal yang dimiliki. Mereka mengharapkan bahwa ternak yang dipelihara dapat bertambah besar, sehat dan beranak sehingga dapat menghasilkan.

Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk oleh atau ditugaskan oleh pihak yang berwenang baik pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok yang ada di masyarakat. Bentuk kemitraan sinergis antara pendamping dengan kelompok Kube yang dilakukan secara terencana terarah dan berkelanjutan untuk memecahkan masalah untuk mewujudkan tujuan kelompok kube. Pendamping adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang dapat meluangkan waktu untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam program pendampingan KUBE. Pendamping Luar adalah pendamping yang berasal dari luar masyarakat ini diadakan apabila sumberdaya manusia setempat kurang mencukupi. Pendamping Dalam adalah pendamping yang berasal dari dalam masyarakat ini diadakan dengan mencari sumber daya manusia yang tersedia di masyarakat setempat.

Kelemahan pelaksanaan ini muncul baik dari anggota maupun pihak-pihak lain yang terkait. Dilihat dari hakekatnya, bahwa bantuan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan, di mana persoalan mereka adalah pemenuhan makan hari ini bukan makan hari esok. Bantuan yang diberikan baru dapat menghasilkan setelah 1 hingga 2 tahun lagi, sehingga bantuan ini dianggap kurang relevan. Pelatihan yang diadakan sangat terbatas dan kurang menyentuh substansi yang harus diberikan. Pelatihan hanya berupa sosialisasi. Dampaknya keterampilan dan komitmen mereka menjadi kurang maksimal. Demikian juga dengan pelatihan

terhadap pendamping sama sekali tidak diberikan, padahal mereka adalah warga setempat yang terbatas kemampuan dan pengalaman.

Adanya perbedaan pendapat dalam kelompok menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan KUBE di wilayah Jakarta Selatan, seperti dalam pemberdayaan dalam pengelolaan individu atau kelompok. Sebagian menginginkan pengelolaan individu dan sebagian meminta dalam kelompok. Beberapa jenis dan pengelolaan usaha kurang berkembang. Sebenarnya KUBE diharapkan tidak hanya mengelola satu jenis usaha, dapat dikembangkan dengan jenis usaha lainnya sehingga pendapatan keluarga dapat meningkat. Selain itu, keberhasilan yang diharapkan kurang sesuai dengan harapan dan keinginan apalagi kebutuhan anggota keluarga yang sangat mendesak, sehingga mereka sulit keluar dari persoalan yang ada. Kondisi ini juga dirasakan oleh Ibu Endah selaku salah satu anggota KUBE dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“Gini sih mbak yang saya tau karena yang kita dapet gak pasti besarnya, kadang kalo pesenan banyak kita dapet banyak. Kalo lagi sepi ya sedikit juga. Itu kali mbak yang bikin pada males-malesan dateng. Yang males itu biasanya sibuk sama usahanya sendiri.”

4.4 Hambatan dalam Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kenyataannya di lapangan tidaklah selalu indah karena berbagai ada hambatan dalam pelaksanaan KUBE ini. Proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bantuan yang diberikan, pendampingan yang dilakukan, serta bagaimana evaluasi dan monitoring. Sebagian KUBE terbentuk atas inisiatif anggota, sebagian karena gagasan atau bentuk aparat desa atau pihak lain yang berkepentingan.

Sejalan dengan pembentukannya maka dalam pengelolaan baik anggota ataupun petugas harian juga bisa termasuk ke dalam dua jenis, ada KUBE yang memang murni dikelola oleh anggota dan sebagian ada pihak yang terlibat karena ada kepentingan, dan masalah-masalah lainnya. Tetapi keberhasilan dan kegagalan KUBE tidak bisa hanya dilihat dari sisi sebelah mata, hanya menyalahkan pihak eksternal yang mungkin terlibat, yaitu karena adanya campur tangan pihak luar. Namun masalah-masalah yang bersifat internal juga perlu dikaji dan dianalisis,

seperti sifat dan unsur-unsur yang ada dalam kelompok, seperti keanggotaan, struktur kelompok dan lain-lain.

KUBE merupakan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya setiap KUBE diberikan pendampingan agar usaha bisa berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan kepada setiap anggotanya. Walaupun selama ini telah ada pendampingan namun tidak semua KUBE memperoleh pendampingan yang cukup. Karena merasa tidak diawasi maka perkembangan beberapa KUBE menjadi tidak baik atau tidak berkembang. Selain itu, para pendamping sebaiknya memiliki keterampilan khusus dan merupakan pegawai dinas bukan relawan sehingga mampu membantu perkembangan KUBE dan bertanggung jawab atas tugas yang dijalanannya.

Bantuan yang diterima tidak utuh, selain itu bantuan yang diberikan diadakan melalui pihak ketiga. Kehadiran pendamping sangat diharapkan, tetapi pelayanan pendampingan yang diberikan kurang profesional karena pelatihan yang diberikan kepada pendamping sangat terbatas dan hampir tidak ada. Pelatihan yang diadakan sangat terbatas dan kurang menyentuh substansi yang harus diberikan. Pelatihan hanya berupa sosialisasi. Dampaknya keterampilan dan komitmen mereka menjadi kurang maksimal. Adanya kepentingan-kepentingan dari luar yang turut campur dalam pengelolaan sebagian KUBE, membuat anggota KUBE kurang leluasa dalam

pengelolaan KUBE termasuk para pendamping. Sebagian anggota kurang mampu dalam pemanfaatan bantuan. Ini sangat terkait dengan pelatihan yang diberikan sangat terbatas. Hambatan lain yang dirasakan adalah menurut anggota KUBE pemasaran sulit dilakukan, mereka sangat membutuhkan kerja sama dengan lembaga pemasaran yang dapat membela kepentingan mereka. Eksistensi usaha mereka masih dirasakan kurang bagi pelanggan yang menjadi konsumen mereka. Terkadang kondisi keuangan kelompok usaha ini membuat kondisi usaha naik turun. Hal ini membuat persaingan sangat ketat dengan usaha sejenis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Program KUBE merupakan salah satu strategi Kementerian Sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan lembaga keuangan mikro. Program itu dilakukan dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan ketrampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan. KUBE ini disertai dengan adanya pendampingan, sehingga usaha yang digeluti KUBE dapat berkembang dengan optimal dan kesejahteraan anggotanya akan meningkat. Keberadaan pendamping KUBE ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pendamping KUBE memiliki peranan yang sangat strategis, yakni sebagai nara sumber, penggerak sekaligus sebagai fasilitator bagi pemberdayaan keluarga miskin. Sudah barang tentu untuk dapat melaksanakan tugas yang cukup berat tersebut para pendamping harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Pelaksanaan kelompok usaha bersama di Jakarta Selatan mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Sejak tahun itu, jumlah KUBE meningkat seiring dengan adanya sosialisasi dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial terkait. Implementasi program ini dimulai dengan adanya suatu analisis tentang bagaimana kondisi kemiskinan yang ada di wilayah tersebut dalam kasus ini adalah wilayah Jakarta Selatan. Dalam perkembangannya KUBE di wilayah ini telah tercipta sebanyak 20 KUBE dengan jenis kegiatan yang beragam dan catering menjadi mayoritas pilihan.
2. Tak ada gading yang tak retak beginilah gambaran pada implementasi program ini, banyaknya jenis usaha macet dikarenakan pendampingan yang kurang membuat program ini seakan sia-sia dan menimbulkan masalah baru. Selain itu, pembentukan KUBE yang dilakukan oleh sebagian pihak

yang memiliki kepentingan serta masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program ini. Kurangnya keterampilan yang diberikan dan Bantuan yang diterima tidak utuh, selain itu bantuan yang diberikan diadakan melalui pihak ketiga.

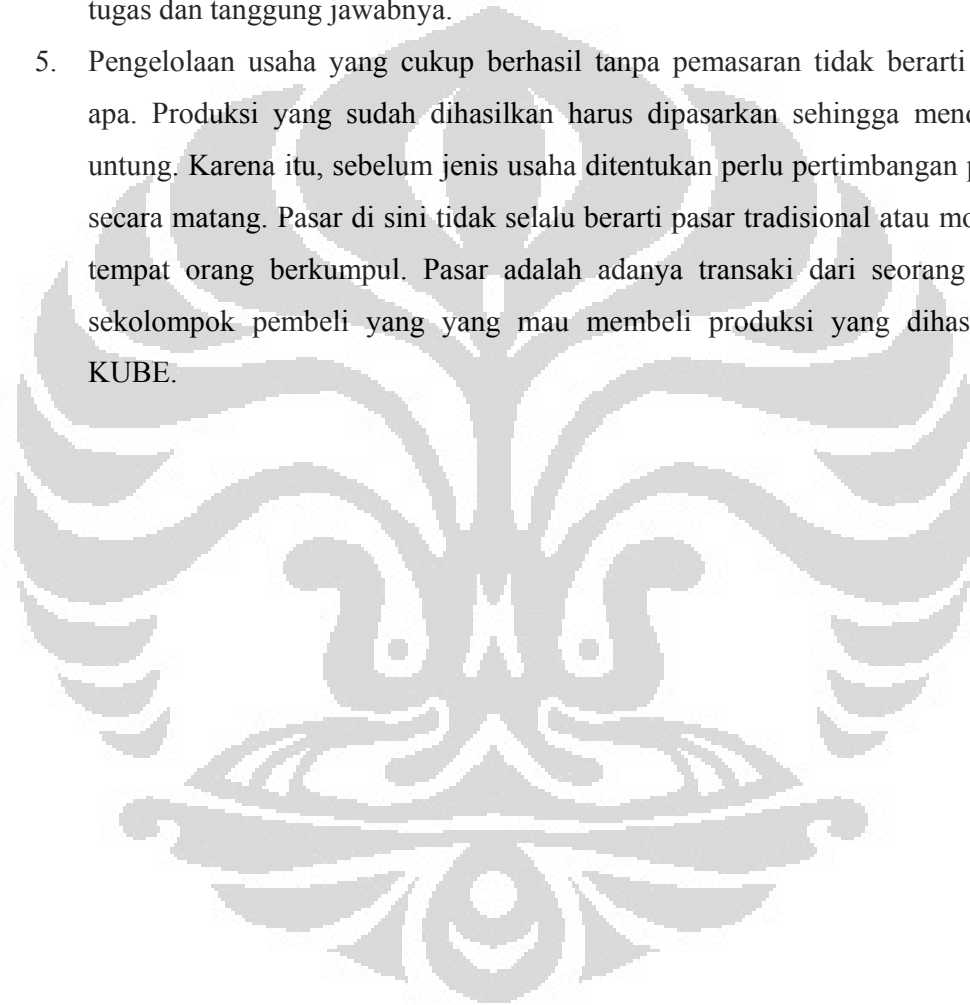
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. KUBE sebaiknya berhubungan baik dengan Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) sehingga sinergi diantara dua lembaga ini dapat berkelanjutan dan berkembang. Hal ini diharapkan sangat membantu KUBE dalam masalah keuangan dan kemitraan terhadap pihak luar.
2. Pelaksanaan sosialisasi program ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan program yang akan diberikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui program yang diluncurkan. Sosialisasi program harus dilakukan terhadap beberapa kelompok sasaran, seperti: lurah, tokoh masyarakat, warga secara umum, dan terutama kelompok calon sasaran.
3. Sebelum pemberdayaan diberikan hal yang penting dilakukan seperti penilaian terhadap kebutuhan kelompok sasaran, apa kebutuhan yang diperlukan yang sangat mendesak. Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini sangat terkait dengan jenis usaha yang dikembangkan. Dalam konsepnya ada jenis usaha yang bersifat harian, ada yang bersifat semesteran dan ada yang bersifat tahunan sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam kerangka teoritik.
4. Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sarannya secara lebih besar. Pelatihan Pendamping. Demikian juga dengan pendamping perlu diberikan pelatihan yang terkait dengan *substansi jenis usaha* yang dikembangkan oleh KUBE yang menjadi binaannya. Materi ini

mulai dari bagaimana manajemen pengelolaan KUBE, pengembangan jenis usaha, pengguliran, supervisi, hingga melakukan evaluasi. Tidak bisa hanya didasarkan pada pengalaman yang ada. Selain itu, *pengembangan komitmen* para pendamping juga menjadi hal yang penting, karena pengalaman menunjukkan banyak para pendamping kurang serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Pengelolaan usaha yang cukup berhasil tanpa pemasaran tidak berarti apa-apa. Produksi yang sudah dihasilkan harus dipasarkan sehingga mendapat untung. Karena itu, sebelum jenis usaha ditentukan perlu pertimbangan pasar secara matang. Pasar di sini tidak selalu berarti pasar tradisional atau modern tempat orang berkumpul. Pasar adalah adanya transaksi dari seorang atau sekelompok pembeli yang mau membeli produksi yang dihasilkan KUBE.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ala, Andre, Bayo, 1981, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Andersen, E. James, 1997, *Public Policy-Making*, Third Edition. New York, Holt, Rinchart and Winston.
- Bryant, Coralie dan White Lousie, G., 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Jakarta, LP3ES.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2000, *Profil Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta.
- Cox, David, 2004, *Online of Presentasion on Proverty Alleviation Programs in Asia Pacific Region*, Makalah disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret 2004.
- Craswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publication, Inc., 1994.
- Dunn, N., William, 1994, *Public Policy Analysis: An Introduction*. Edisi Ke-2, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., A Simon & Schuster Co., Terjemahan dari Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Pengantas Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Tajuddin Noer, 1993, *Sumberdaya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.
- Esmara, Hendra, 1986, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Freidman, J and Sullivan F., 1974, *The Absorbtion of Labour in The Urban Economy: The Case of Developing Country*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Isamy, M. Irfan, 1994, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik, (Public Policy)*, Jakarta, Rajawali Press.

- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi Daerah-Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- BPPN, 2007, *Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium development Goal's Indonesia 2007*, Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mikelsen, Britha, 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Terjemahan: Matheos Natle, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Nawawi, Ismail, 2009, *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya: PMN.
- Mubyarto, 2002, *Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal, Ekonomi Rakyat, Tahun 02/April 2002.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri, 2004, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Parson, Wayne. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ridlo, Muhammad Agung, 1990, *Evaluasi Pemukiman Kembali (Resettlement) Masyarakat Miskin (Daerah Studi: Pemukiman YSS Mangunharjo dan Mayangsari di Kota Semarang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Juursan Teknik Planologi Universitas Islam Bandung.
- Rusli, Said, 1995, *Metodologi Identifikasi Golongan Darah dan Daerah Miskin Suatu Tinjauan dan Alternatif*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Utama dan Institut Pertanian Bogor.
- Sahdan, Gregorius, 2005, *Menanggulangi Kemiskinan Desa, Jurnal Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*, Maret 2005.
- Santosa, H., DG. Hidyata dan P. Indrayono, 2003, *Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Tahun II No.2 April 2002, Jakarta, www.ekonomirakyat.org
- Sayogyo, 1996, *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Siagian, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, CV. Haji Masagung.

- Silas, Johan, 1993, *Pemukiman Kumuh di Jakarta, Tinjauan Kontradiktif-Komparatif*, Jakarta: Masyarakat Jurnal Sosiologi Jurusan FISIP UI dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Soegijoko, Budhi Tjahjati S. dan BS. Kusbiantoro, 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia (Mengenang Prof. Dr. Soegijanto Soegijoko)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono, AG., 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Fajar.
- Subakti, A Ramlan, 1984, *Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung: Kota Bermuka Dua*, PRISMA, Nomor 5 tahun XIII.
- Supriyatna, Tjahya, 1997, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung, Humaniora Utama Press.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2007, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Tim Koordinasi PNPM-PPK, 2007, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM-PPK*, Jakarta, Depdagri.
- UNESCO, 2002, *Human Development Index*, Indek Pembangunan Manusia.
- Wahab, Abdullah, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT.Grafindo Persada.
- Winarno, Haryo, Deni Zulkadi Pradono, dan Miming Diharja, 2002, *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*, Bandung, Departemen teknik Planologi ITB.

Peraturan

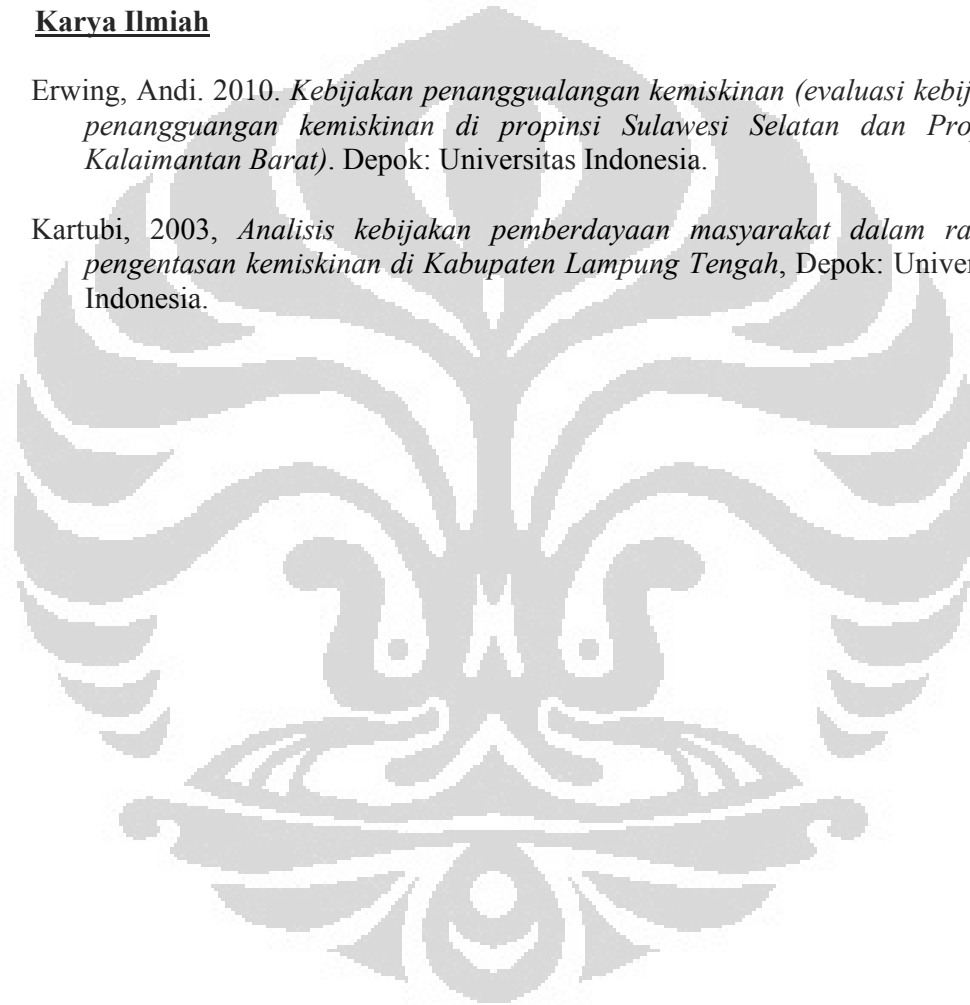
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Karya Ilmiah

Erwing, Andi. 2010. *Kebijakan penanggulangan kemiskinan (evaluasi kebijakan penanguangan kemiskinan di propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Kalimantan Barat)*. Depok: Universitas Indonesia.

Kartubi, 2003, *Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah*, Depok: Universitas Indonesia.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas:

Nama : Puji Meilita Sugiana
NPM : 0906589293
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Mei 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Alamat Rumah : Kp. Utan RT 002/08 No. 88
Ragunan, Jakarta Selatan
Pekerjaan : PNS DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Barat No. 8-9
Jakarta Pusat

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar : SD Negeri 01 Pagi Jakarta
Lulus Tahun 1999
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : SMP Negeri 41 Jakarta
Lulus Tahun 2002
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas : SMA Negeri 70 Jakarta
Lulus Tahun 2005
Diploma IV : Sarjana Saint Terapan Pemerintahan
STPDN Jatinangor
Lulus Tahun 2009

Universitas Indonesia

PEDOMAN WAWANCARA DINAS SOSIAL DKI JAKARTA

DAN SUKUBUDAYA DINAS SOSIAL JAKARTA SELATAN

1. Latar belakang kebijakan program Kelompok Usaha Bersama
2. Tujuan, manfaat, dan sasaran Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama
3. Tahapan atau proses awal yang dilakukan sebelum Kelompok Usaha Bersama dibentuk
4. *Standard Operating System* (SOP) Kelompok Usaha Bersama
5. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama
6. Sosialisasi program Kelompok Usaha Bersama
7. Awal mula pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama di DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan
8. Prosedur dana yang diberikan masing-masing Kelompok Usaha Bersama
9. Pihak-pihak yang terkait dengan Kelompok Usaha Bersama
10. Jenis-jenis Kelompok Usaha Bersama yang ada di Jakarta Selatan
11. Jenis Pelatihan serta pendampingan yang dilakukan
12. Jangka waktu pendampingan untuk setiap Kelompok Usaha Bersama
13. Mekanisme pelaporan kegiatan Kelompok Usaha Bersama
14. Kekuatan (*strength*) dari program Kelompok Usaha Bersama di Jakarta selatan
15. Hambatan dari pelaksanaan kebijakan program Kelompok usaha bersama
16. Harapan kedepannya untuk Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama di Jakarta

PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA DAN PENGURUS

KELOMPOK USAHA BERSAMA

1. Latar belakang keikutsertaan dalam Kelompok usaha bersama
2. Manfaat yang dirasakan selama bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama
3. Jenis usaha yang dilakukan dan apa saja usaha yang ada di wilayah Jakarta Selatan
4. Keaktifan ibu/bapak dalam Kelompok Usaha Bersama yang diikuti
5. Biaya yang harus dikeluarkan
6. Pelatihan apa saja yang didapatkan oleh setiap anggota
7. Hak dan kewajiban apa saja yang harus dijalankan oleh setiap anggota
8. Hambatan dalam pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama
9. Harapan untuk usaha di Kelompok Usaha yang diikuti

Hasil Wawancara dengan Dinas Sosial

Nama : Dra. Susy Dwi Harini, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Waktu : Kamis, 12 April 2012

I : Latar belakang kebijakan program Kelompok Usaha Bersama di DKI ini apa, bu? Apakah ada faktor lain selain kemiskinan?

N : Kemiskinan itu memang latar belakang yang paling dasar dari kebijakan ini diterapkan di Jakarta. Sebenarnya ini kan emang kebijakan nasional yang dilaksanakan di setiap provinsi mba. Memang disini sudah lama dilaksanakan sekitar 5 tahun yang lalu, tapi dilaporkan banyak yang tutup karena memang gak bisa bertahan dan eksis di luar. Miskin itu kan banyak faktor ya mbak, salah satunya karena gak punya uang, gak punya uang karena gak punya kerjaan atau kerjaan yang dijalankan tidak cukup buat kehidupan sehari-hari. Nah, KUBE ini salah satu cara pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di Jakarta untuk bisa mengembangkan usahanya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan lain. Efek domino nya yang diharapkan itu mbak.

I : Terus tujuan, manfaat, dan sasaran Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama apa, bu?

N : Tujuan KUBE sebenarnya akan diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan. Caranya itu dengan peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. Jadi, mbak program ini dibuat pasti dengan tujuan. Tujuan umumnya sebetulnya penghapusan kemiskinan dengan memberikan pendapatan lain seperti usaha untuk meningkatkan kesejahteraan social dan keberfungsian sosial keluarga miskin.

I : Dalam pelaksanaan apakah ada *Standard Operating System* (SOP) yang dibuat untuk pelaksanaan program ini bu?

N : Ada, mbak bisa liat di peraturannya disini.

I : Apa saja kegiatan pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama yang disediakan oleh dinsos, bu?

N : Binaan.

I : Berapa besar dana KUBE yg diberikan kepada anggota bu?

N : 2 juta, eh 20 juta per kelompok. Artinya Indeks perorang itu 2 juta. Jadi 20 juta per kelompok. Kalo BLPS 30 juta per kelompok. Kalo LKM 250 juta, pake LKM itu pake lembaga, satu kecamatan.

I : Bagaimana kekuatan (*strength*) dari program Kelompok Usaha Bersama di Jakarta ini bu?

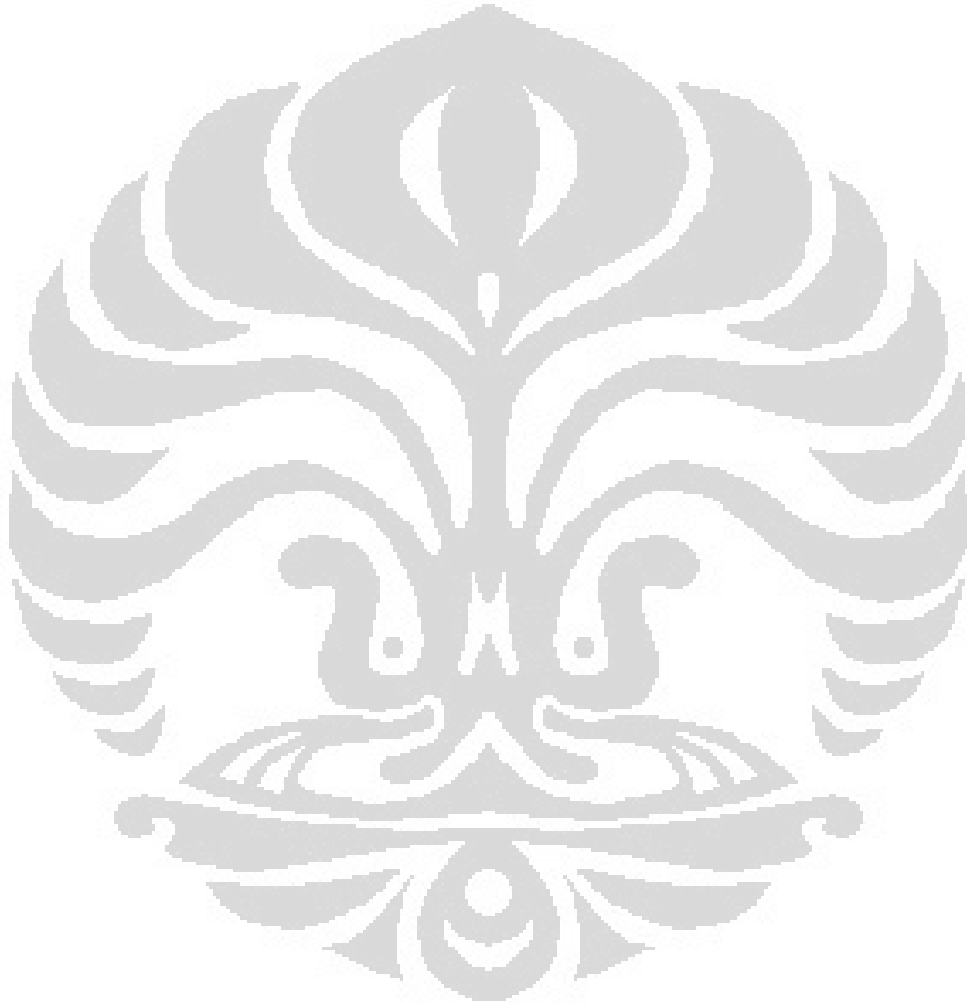
N : Selama ini memang apa yang sudah dijalankan belum bisa dilaksanakan dengan maksimal karena kendala berbagai macam hal. Kekuatan sebenarnya terletak pada dukungan dari pemerintah untuk berjalannya kegiatan ini di Jakarta. Tapi ya mbak, kesadaran itu masih belum banyak yang punya, jadi agak sulit. Misalnya, ada yang gabung tapi mereka lebih fokus sama apa yang mereka punya, ya usahanya mereka. Begitu mbak.

I : Jadi selain yang tadi ibu bilang, hambatan dari pelaksanaan kebijakan program Kelompok usaha bersama yang lain ada gak bu?

N : Jujur aja mba, disini tuh sulit banget memasarkan produk. Masih belum bisa disandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran.

I : Terakhir bu, harapan kedepannya untuk Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama di Jakarta apa bu?

N : tentu saja apa yang menjadi tujuan dari pemerintah bisa dicapai. Masyarakat dapat menikmati dana ini dengan benar sehingga bisa menambah pendapatan mereka.



Hasil Wawancara Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan

Nama : Irwan Santoso, SH

Jabatan: Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Sudin Sosial Jakarta Selatan

Waktu : Selasa, 23 April 2012

I : Latar belakang kebijakan program Kelompok Usaha Bersama apa, Pak?

N : Jakarta dengan berbagai permasalahan yang ada dari banyak yang nganggur, banyak orang miskin, banyak orang fakir, macet, semua mahal, dan masalah-masalah yang lain. Pemerintah punya solusi untuk salah satu permasalahan yang dianggap paling dasar di Jakarta. Apa masalahnya, yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini kan disebabkan oleh banyak hal dari orang yang gak punya kerjaan sampe orang yang gak punya modal usaha akhirnya gak kerja dan tidak punya uang. Pemerintah memberikan sedikit solusi untuk mereka yang punya usaha kecil, modal pas-pasan untuk mengembangkan usahanya dan memberikan kesempatan untuk orang lain berkembang dan membuka lapangan kerja toh. KUBE ini lah jawaban yang bisa diberikan oleh pemerintah. Mbak tau sendirikan jakarta selatan ini kan sentral kegiatan ekonomi ada disini. Disini mencoba memberikan kesempatan pengusaha-pengusaha kecil untuk berkembang. Begitulah kira-kira latar belakangannya. Saya pikir semua latar belakang kegiatan ini sama yaitu kemiskinan.

I : apa tujuan, manfaat, dan sasaran Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama ini Pak?

N : Tujuan itu ya memberikan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan juga menambah pendapat mereka pastinya jadi yang sebelumnya hanya mendapat untung 20.000 sehari bisa jadi 100.000 per hari ditambah usaha bersama mereka. Eh, yang itu manfaat. Kalo tujuan sebenarnya sudah diterangkan dalam peraturan yaitu untuk meminimalisasi angka kemiskinan

di Jakarta yang semakin hari bertambah. Memang orang miskin di Jakarta sedikit, tapi orang yang mengarah ke orang miskin di Jakarta tempatnya.

I : Bagaimana tahapan atau proses awal yang dilakukan sebelum Kelompok Usaha Bersama dibentuk?

N : Jadi awal pembentukan KUBE ini melalui beberapa survei tentang apa usaha yang seang dijalani oleh orang tersebut dan dibuatkan serta disatukan dengan orang lain yang sekiranya memiliki keterampilan yang sama dan memiliki kedekatan tempat tinggal. Sebenarnya semua orang berhak dan bisa dapat dana ini, tapi ada prosesnya itu tadi.

I : Apakah *Standard Operating System* (SOP) dari kegiatan Kelompok Usaha Bersama?

N : Ada, SOP nya itu yang ada di peraturan itu loh mbak. Yang tadi saya kasih hardcopy nya. Baca dari situ nanti ada kok.

I : Bagaimana dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama di Jakarta Selatan?

N : Pengelolaan dilakukan oleh masing-masing anggota KUBE. Masing-masing KUBE itu kan ada Ketua, Bendahara, dan Sekertarisnya dan juga anggota pastinya. Mereka lah yang berkewajiban melakukan pengelolaan terhadap KUBE yang mereka bentuk. Pengembangan sendiri dilakukan berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing KUBE. Setiap KUBE kan punya pendamping, pendamping ini bisa mengarahkan bagaimana mereka bisa berkembang dengan berbagai inovasi-inovasi tapi dikembalikan lagi ke setiap KUBE mau atau tidak mengembangkan apa yang sudah dibentuk.

I : Apa saja kegiatan sosialisasi program Kelompok Usaha Bersama?

N : Sosialisasi disini hanya berdasarkan pada penyuluhan. Belum ada yang lebih. Sampai saat ini hanya sebatas kegiatan PKK atau karang taruna di setiap kecamatan.

I : Di Jakarta Selatan ada jenis-jenis Kelompok Usaha Bersama apa saja Pak?

N : Sampai saat ini hanya sebatas pada jenis usaha dibidang kuliner dan jahit-menjahit. Sebenarnya ada yang mengajukan ternak, yah tapi kan mbak tau sendiri kalo disini lahannya yang sempit. Sudah bangunan rumah dan gedung-gedung.

I : Selama ini anggota KUBE dapat Pelatihan serta pendampingan seperti apa Pak?

N : Pelatihan khusus tidak ada hanya ada bagaimana membuat suatu kemasan yang menarik sehingga memberikan perbedaan dengan produk lain. Pendamping yang bertugas untuk itu. Jadi pelatihan diberikan kepada pendamping kemudian dia yang bertugas menyampaikan.

I : Bagaimana dengan mekanisme pelaporan kegiatan Kelompok Usaha Bersama?

N : Pelaporan dibuat dengan format yang sudah ditentukan sebelumnya. Tapi disini banyak kelemahannya, kebanyakan dari mereka buat tidak detail sehingga informasi yang kita butuhkan tidak ada dalam laporan dan memberikan efek sia-sia saja.

I : Hambatan apa saja yang dihadapi dari pelaksanaan kebijakan program Kelompok usaha bersama?

N : Tadi saya sudah sebut, pelaporan. Ada juga usaha yang gak berkembang. Disitu-situ aja. Jadi kebanyakan hanya fokus sama usaha dia sendiri tanpa memperhatikan usaha yang dibangun bersama.

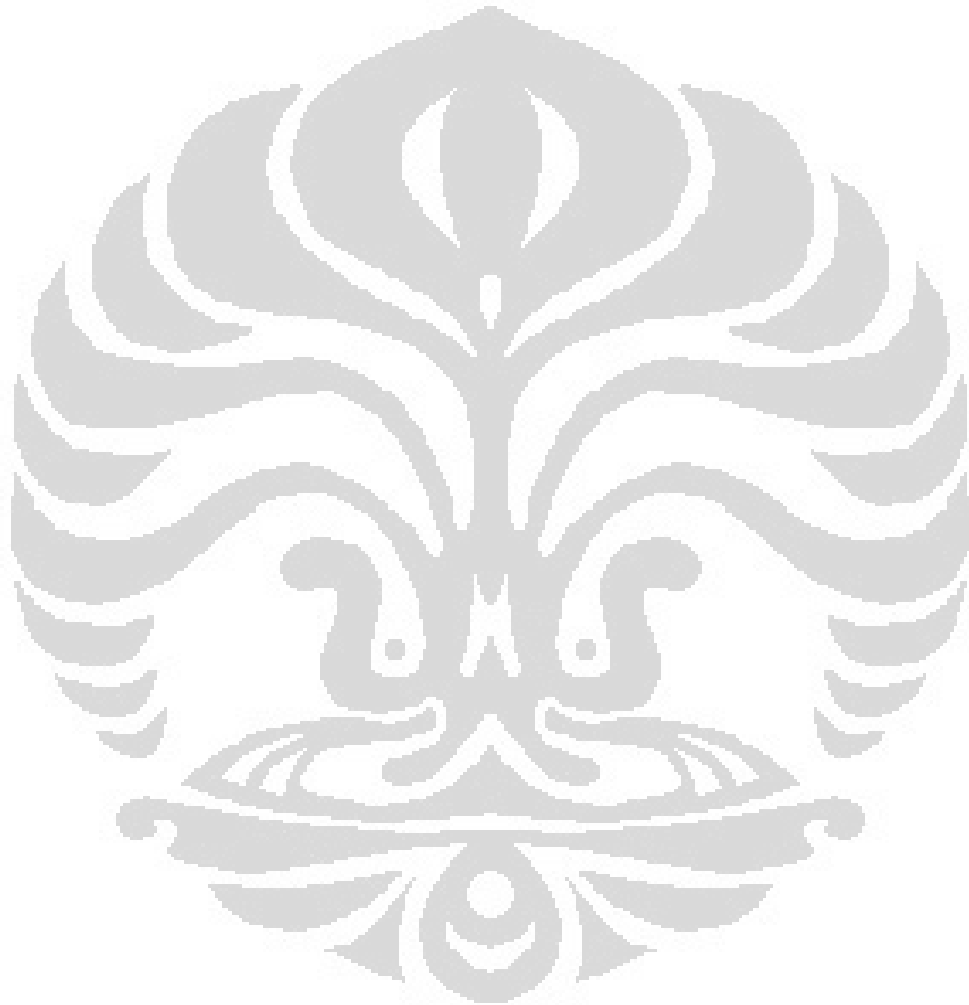
I : Apa saja harapan kedepannya untuk Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama di Jakarta Selatan Pak?

N : Semoga ini bisa menjadi bantuan yang efektif kepada masyarakat dan bisa dipergunakan dengan baik sehingga mereka yang miskin bisa terbantu dan

menjadi usaha yang bisa bersaing dengan usaha lainnya di luar sana. Begitu aja mbak, simple aja.

I : Terima kasih atas waktunya Pak.

N : Sama-sama mbak.



Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Usaha Bersama

Nama KUBE : BELIBIS
Jenis Usaha : Katering
Nama Anggota : Ibu Endah

I : Latar belakang keikutsertaan ibu dalam KUBE ini apa bu?

N : Yah, mbak tau lah ini kan buat orang-orang gak mampu dan uangnya dikit. Saya kan rakyat kecil, gaji bapak suka gak cukup buat hidup sehari-hari. Belum lagi bayarin anak sekolah. Anak saya 3 masih kecil dan butuh dana buat bayaran sekolah. Lumayan dari pada bengong di rumah gak ngapa-ngain jadi saya ikutan aja disini.

I : Ibu, KUBE yang ikut ibu gabung usahanya apa bu?

N : Katering, saya kan cuma bisa masak aja mbak, jadi ya itu aja yang saya bisa ikutin. Udah gitu, ini juga awalnya diajak sama temen saya.

I : Sejak kapan ibu bergabung dalam kelompok ini?

N : Kalo saya gak salah tahun 2008 deh mbak.

I : Selama hampir empat tahun ibu bergabung manfaat yang dirasakan atau di dapatkan di kelompok yang ibu ikuti?

N : Apa ya mbak, dibidang membantu ekonomi keluarga saya gak terlalu. Karena emang usahanya yang gak terlalu besar jadinya untungnya juga gak besar. Kan dibaginya sampe 10 orang tuh mbak. Lagian juga ya mbak, kateringnya disini banyak jadi bersaing banget.

I : Terus bu, strateginya gimana biar katering ibu bisa lebih banyak pelanggannya?

N : Tetap jaga rasa makanannya aja, paling yang saya tau itu harganya aja. Kalo dari kemasan kayaknya semua katering sama aja deh mbak. Paling variasi makanan yang banyak, jadi pelanggannya juga gak bosan.

I : Maaf bu, di KUBE ini ibu sebagai apa dan apa aja hak dan kewajibannya?

N : Saya disini anggota aja, bukan siapa-siapa mbak. Kewajibannya ya itu tadi dateng pagi-pagi terus masak buat katering makan siang, kadang ikut belanja sehari-hari, kadang ikut anterin katering ke kantor-kantor depan itu tuh. Dari itu saya bisa dapet tambahan penghasilan, yah walaupun sedikit tapi lumayan buat jajan anak saya.

I : Bu, di KUBE ini semua anggotanya aktif gak? Kan tadi ibu bilang ada sepuluh orang tuh, nah aktif semua gak sepuluh-sepuluhnya?

N : Yang aktif ya aktif, yang gak mah gak. Tergantung aja mbak.

I : Yang gak aktif itu biasanya kenapa bu?

N : Nggak tau saya, misalnya jarang masuk. Gini sih mbak yang saya tau karena yang kita dapet gak pasti besarnya, kadang kalo pesenan banyak kita dapet banyak. Kalo lagi sepi ya sedikit juga. Itu kali mbak yang bikin pada males-malesan dateng. Yang males itu biasanya sibuk sama usahanya sendiri.

I : Bu, waktu pertama kali gabung di KUBE, ada biaya yang harus dikeluarkan gak?

N : Uang pendaftaran gitu maksudnya ya mbak?

I : Semacam itulah bu.

N : Kalo itu gak ada, tapi setiap hari saya harus iuran seribu. Itu sih katanya ibarat kayak uang kas kita. Kalo misalnya ada apa-apa, kan ada uang selain dana bantuan itu

I : Selama ibu ada disini, pelatihan apa saja yang didapatkan ibu dan anggota lainnya? Kayak pelatihan masak atau apa gitu?

N : Kalo pelatihan masak sih gak ada, karena emang kita semua disini pada dasarnya udah punya kemampuan itu.

I : Kalo pendamping gimana bu?

N : Ada kok, tapi emang gak lama. Mereka itu dari dinas sosial Jakarta.

I : Apa yang pendamping lakukan selama ada di KUBE ini?

N : Kalo saya gak salah inget ya mbak, mereka itu melakukan pendampingan untuk setiap KUBE sampai bisa berjalan sendiri. Dalam artian mereka membimbing, dilihat perkembangannya, terus bantu buat strategi. Dulu pendamping disini juga sebagai ketua mbak.

I : Selama ibu bergabung disini, kira-kira hambatan apa saja yang ibu rasakan?

N : Kalo saya secara pribadi, kadang suka gak sreg sama orang-orangnya. Kadang ya mbak, suka selisih paham gitu sama anggota lainnya. Kami disini juga merasa perlu banget dapet pelatihan lebih mendalam. Misalnya soal pemasaran yang baik. Ajarin bikin kemasan yang berbeda ama catering yang lain.

I : Bu terakhir, apa harapan untuk usaha di Kelompok Usaha yang diikuti?

N : Nggak muluk-muluk mbak, yang penting tetep lancar supaya bisa dapet penghasilan dari sini. Bantuin suami cari duit.

Hasil Wawancara dengan Anggota KUBE

Nama KUBE/ Jenis : KUBE Mandiri/ Menjahit

Nama Anggota : Ibu Erna

Hari, tanggal : Jumat, 20 April 2012

I : Bagaimana awal mula KUBE ini terbentuk?

N : Latar belakangnya karena ada sosialisasi di kecamatan untuk buat usaha kemudian dikasih modal sama mereka. Disini kebutulan banyak orang yang mau usaha tapi pada gak punya modal. Ada juga yang memang punya keterampilan tapi gak ada duit akhirnya sayang kan keterampilannya. Memang kan kelompok usaha ini dibuat untuk mereka yang mau usaha tapi gak punya uang. Bergabung jadi satu jadi lah Kelompok Usaha Bersama Mandiri

I : Jenis usahanya apa ya, bu? Anggotanya ada berapa?

N : Jenis usaha kita itu Menjahit. Anggotanya ada 10 orang. Termasuk pengurus kayak ketua sama bendahara dan lain-lain.

I : Semua anggota disini, sebelumnya memang sudah bisa menjahit atau ada yang belum bisa atau bagaimana bu?

N : Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kelompok ini dibuat berdasarkan kesamaan keterampilan yang kami miliki. Keterampilan yang saya maksud adalah ini, menjahit. Jadi pada dasarnya memang sudah bisa, tapi memang untuk level nya berbeda-beda. Memang sudah ada yang ahli sekali atau hanya bisa sekedar menjahit celana yang bolong atau vermak biasa.

I : Selama ibu bergabung, manfaat apa saja yang ibu dapat dari usaha ini?

N : Tujuan utama terbentuknya kegiatan ini adalah membantu meningkatkan perekonomian dari masyarakat fakir miskin atau lebih halusnya ekonomi kelas bawah supaya mereka bisa memiliki hidup yang lebih layak. Pastinya manfaat

seperti itu yang saya rasakan, bisa memiliki penghasilan lain selain gaji suami itu manfaatnya. Setidaknya saya bisa meringankan beban suami untuk bisa kasih uang jajan buat anak. Jadi kalo suami saya kerja untuk bayar sekolah anak, ya saya kerja buat jajan anak. Adil kan jadi lebih ringan gitu mbak.

I : Maaf bu, sebelumnya ibu bekerja dimana?

N : Nggak, saya cuma ibu rumah tangga biasa. Dulu sebelum saya berkeluarga, saya pernah kerja di konveksi tapi bangkrut konveksinya terus nganggur lagi. Gak lama nikah, punya anak. Susah cari kerjaan di Jakarta.

I : Maaf bu, kalo boleh tau penghasilan bapak berapa dan kerja apa?

N : Bapak kerja sales rokok, gajinya Cuma 1,3 juta. Belum potong buat bayar kontrakan, anak sekolah. Bayaran sekolah biarpun dibilang gratis tetep aja ada yang namanya uang buku, beli seragam, ada ajalah. Makanya kadang pusing banget.

I : Jadi kalo saya bisa simpulkan dari pernyataan ibu, kegiatan ini sudah membantu perekonomian ibu selama ini?

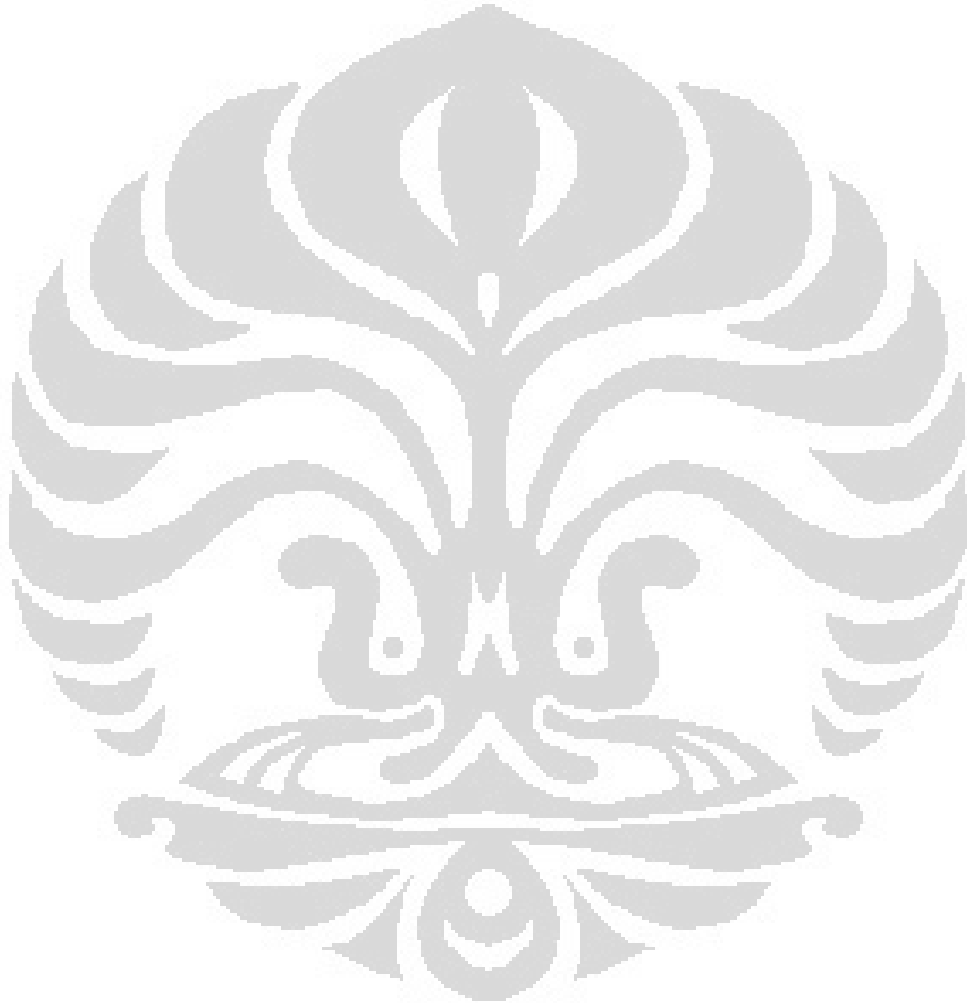
N : Membantu sih iya, tapi gak banyak. Namanya juga usaha kayak gini, belum punya nama. Jadi ya mbak, penghasilan ada tapi gak tentu, tergantung banyak apa gak nya orderan ke kita.

I : Hambatannya apa sih menurut ibu?

N : Hambatannya sebenarnya masalah pada bagaimana kita bisa mengembangkan usaha ini. Disini kita gak punya koneksi yang terlalu luas untuk berkembang. Selain itu, membangun kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa kita masih sangat sulit. Pendampingan kadang kali hanya sebagai formalitas tanpa adanya tindakan yang berarti buat kita.

I : Terakhir, harapan ibu seperti apa untuk KUBE ini?

N : Harapan saya adalah usaha ini bisa berkembang dan tujuan dari dibentuknya ini bisa tercapai sehingga orang-orang miskin bisa dibantu dan kemiskinan jadi semakin kecil.



Hasil Wawancara Anggota KUBE

Nama Narasumber : Ibu Rosidah
Nama dan Jenis KUBE : Permai, Kue Kering
Hari, tanggal : Jumat, 20 April 2012

I : Latar belakang ibu ikut dalam kegiatan usaha bersama ini apa bu?

N : Waktu itu, saya kan emang punya usaha jual sayuran tuh di depan rumah. Nah, pas ada kegiatan ini saya dikasih tau ama ibu ketua PKK. Nambah modal dan juga bisa nambah penghasilan selain saya jualan sayur.

I : Ibu, ikut usaha apa? Usaha itu atas kesepakatan bersama atau bagaimana?

N : Saya ikutan usaha kue kering kayak buat nastar, kastangel, putri salju kayak gitu lah mbak. Waktu itu, kami ngumpul bersepuluh terus diskusi mau usaha apa yang bisa dijalanin tapi gak nyita banyak waktu dan tenaga. Kan kita semua punya usaha masing-masing tuh mbak, kalo yang ini nyita waktu nanti gimana yang usaha kita pertama jadi semuanya kesepakatan bersama. Usaha ini deh yang kita jalanin.

I : Setelah sekian lama berjalan, ibu dapat manfaat apa dari kegiatan ini?

N : Banyak mbak. Dapet modal buat nambahin usaha saya. Terus nambahin penghasilan juga mbak.

I : Biasanya kalo ibu kumpul kegiatan kapan?

N : Namanya juga usaha kue kering ya mbak, jadinya kami kumpul kalo pesanan banyak dan biasanya hari-hari raya kayak lebaran, natal, lebaran cina. Kan orang-orang pada pesen kue tuh.

I : Pendapatannya gimana bu dari hasil usaha ini?

N : Enaknya gini mbak sebenarnya, karena saya kan jualan sayur. Nah kalo puasa-puasa gitu kan agak berkurang ya penjualannya. Nah, pas banget ada usaha ini buat nambahin pendapatan. Gak banyak banget tapi lumayan buat nambahin pendapatan suami.

I : Hak dan kewajiban ibu disini bagaimana bu?

N : Hak saya pastinya saya dapet uang 2 juta itu. Nah terserah masing-masing orang dari jumlah itu berapa persen buat pribadi dan berapa persen buat usaha sendiri. Kalo saya 70% buat usaha saya sisanya untuk KUBE ini. Kewajibannya Cuma datang pada saat kegiatan ada dan ikut pelatihan dari pendamping disini.

I : Pendamping itu sebagai pelatih disini atau sebagai pengawas bu?

N : Pendamping itu orang yang kasih kita pengetahuan cara bikin kemasan yang menarik, bungkusnya gimana. Kayak gitu. Kalo pengawas mah biasanya ya dari dinsos itu mbak.

I : Hambatannya apa sih bu?

N : Aduh mbak, saya tuh susah banget bikin laporan. Kan setiap orang buat tuh, nah kadang bingung sendiri ama laporannya. Sama itu mbak...eee..... kalo mau kumpul suka pada sibuk sendiri.

I : Harapannya gimana bu?

N : Lancar-lancar aja lah mbak. Supaya kami rakyat kecil bisa punya pendapatan lain dari usaha kami. Maap ya mbak, saya harus buru-buru anter anak saya sekolah.

I : Terima kasih bu.